



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN TATA CARA

Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang Mendukung Pembangunan yang Responsif Gender





KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah selesai memfasilitasi Kementerian Perhubungan untuk menyusun Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang mendukung Pembangunan yang Responsif Gender.

Buku ini merupakan potret dan kondisi laki-laki dan perempuan di Bidang Perhubungan, meliputi penyajian data dasar, data ketenagakerjaan, data keterlibatan SDM dalam tahapan manajemen, serta data pemanfaatan hasil pembangunan di Bidang Perhubungan.

Data terpilah yang terkumpul merupakan hasil uji coba Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang Responsif Gender, yang telah disusun sebelumnya. Suksesnya penyusunan data terpilah ini berkat kerjasama yang intensif antara konsultan, jajaran di lingkup Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c/q Asisten Deputi Gender dalam Infrastruktur, melalui serangkaian *workshop* penyusunan dan pengolahan data. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Sudarti Subakti, Bapak Slamet Mukeno, dan Bapak Mukadi Hadi Widjojo selaku pakar data dan statistik dan seluruh jajaran pada Kementerian Perhubungan yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa panduan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan.

Akhir kata semoga panduan ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender Bidang Perhubungan.

Jakarta, Desember 2012
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender
Bidang Ekonomi

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, Msc.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi semua Kementerian, dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melakukan pengarusutamaan gender, sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan mempertimbangkan aspek gender.

Dalam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dan Kementerian Perhubungan Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Pengarusutamaan Hak Anak Di Bidang Perhubungan, pada tanggal 19 Januari 2011, terdapat 7 Kegiatan Yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Perhubungan, dimana salah satu poinnya adalah: Menyiapkan data terpilah dan statistik gender di bidang Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur perhubungan yang responsif gender, perlu disusun Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan Yang Responsif Gender agar setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat menyiapkan dan menyusun sendiri data terpilah bidang Perhubungan.

Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan Yang Responsif Gender ini belum mencakup semua aspek dan baru sebatas data Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai pembuka wawasan, untuk selanjutnya akan dikembangkan dengan menyusun pedoman penyusunan data terpilah yang terkait dengan sarana dan prasarana bidang Perhubungan yang responsif gender, contohnya fasilitas di terminal, stasiun dan bandara yang disediakan untuk penumpang seperti; toilet, *nursery room*, dan ruang merokok.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta semua pihak yang telah memberikan kontribusinya, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Namun, mengingat Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan Yang Responsif Gender ini merupakan hal yang baru, maka masukan dan saran konstruktif masih kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terkait, dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur perhubungan di masa mendatang yang lebih responsif gender.

Jakarta, Desember 2012
Kementerian Perhubungan
Sekretaris Jenderal

Leon Muhamad

TIM PENYUSUN

PEMBINA :

Kementerian Perhubungan : EE. Mangindaan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak : Linda Amalia Sari, SIP

PENGARAH :

Kementerian Perhubungan : Sugianto, ATD.MM

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak : Dr. Ir. Sulikanti Agusni, MSc

KONTRIBUTOR :

Konsultan : 1. Dr. Sudarti Surbakti
2. Slamet Mukeno
3. Mukadi Hadi Widjojo
4. Dra. Sri Subekti, MM
5. Dra. Pudji Kinanti
6. Dra. Wahyuriani
7. Ratna Pratiwi, S.Si

Kementerian Perhubungan : 1. Rita E.M. Simanjuntak
2. Safrudin, SE
3. Dr. Bambang Istianto M.Si
4. Drs. Suyatman, M.Str
5. Dra. Wiwi Harti, MM
6. Nuraini S.Kom
7. Ferdinand Anon Bayu Aji, SH, M.Sc

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak : 1. Dra. Valentina Ginting, M.Si
2. Siti Mardiyah, S.Pt, M.Si
3. Helsyanita
4. Dwi Supriyanto, SH
5. Nani Dwi Wahyuni, SE, MIS
6. Renna

PENYUNTING :

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak : Dra. Valentina Ginting, M.Si

DESAIN : Interaxi Selaras

DITERBITKAN OLEH :

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kementerian Perhubungan

ISBN - 978-979-3247-73-1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Sambutan Kemenhub	iii
Tim Penyusun	iv
Daftar isi	v

PENDAHULUAN

A	Latar Belakang	1
	1 <i>Affirmative Action</i>	1
	2 Pengarusutamaan Gender	1
B	Pengertian Gender dan Isu Gender	3
C	Pengertian Data Terpilah dan Data Gender	4
D	Tujuan Penyusunan Buku Panduan	4
E	Manfaat Data Terpilah	5

JENIS DATA TERPILAH DAN SUMBERNYA

A	Data Partisipasi SDM dalam Pembangunan Perhubungan	7
	1 Data Sumber Daya Manusia Umum	7
	2 Data Sumber Daya Manusia Khusus	7
B	Data Pemanfaat Hasil Pembangunan Perhubungan	7
	1 Peningkatan Kualitas Manusia	7
	2 Bangunan Fisik	8
	3 Dokumen/Pengaturan	8
	4 Hasil Pengawasan	8
C	Data Pendukung Pembangunan Perhubungan	8

IDENTIFIKASI DATA MANFAAT PEMBANGUNAN YANG AKAN DIPILIH

A	Sekretariat Jenderal	9
B	Inspektorat Jenderal	10
C	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	10
D	Pengembangan SDM Perhubungan	10
E	Ditjen Perhubungan Darat	10
F	Ditjen Perkeretaapian	11
G	Ditjen Perhubungan Laut	11
H	Ditjen Perhubungan Udara	11

PENYAJIAN DATA TERPILAH

A	Penyajian Tabel	17
B	Penyajian Narasi	18
C	Penyajian Gambar	20

JENIS TABEL YANG DISAJIKAN

A	Daftar Tabel Pelaku Pembangunan	21
B	Daftar Tabel Pemanfaat Hasil Pembangunan	22
C	Daftar Tabel Pendukung Pembangunan Perhubungan	24

PENUTUP	25
Daftar Pustaka	27
LAMPIRAN	
Lampiran A	29
Lampiran B	53
Lampiran C	79

A. Latar Belakang

Menyadari masih adanya perbedaan peran, kondisi dan status laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, sebagaimana terjadi di banyak negara di dunia, Pemerintah RI berupaya keras untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi perbedaan tersebut. Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, telah ditempuh melalui dua pendekatan penting yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, yaitu *affirmative actions* dan pengarusutamaan gender.

1. *Affirmative actions*

Merupakan suatu kebijakan atau program sebagai langkah perbaikan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya diskriminasi yang sudah berjalan lama, melalui tindakan nyata untuk menjamin adanya kesempatan yang sama, misalnya di bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan politik. Kebijakan atau program semacam ini bertujuan tidak hanya untuk menghilangkan diskriminasi saat ini tetapi juga untuk menghilangkan dampak adanya diskriminasi masa lalu. Hal yang mendasari *affirmative actions* adalah hak azasi manusia yang pada intinya bahwa seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai kemampuan sama harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya.

Di Indonesia, kebijakan *affirmative actions* yang merupakan kebijakan sementara sebagai kompensasi terhadap perlakuan diskriminatif di masa lalu telah diterapkan, antara lain dalam ketentuan perwakilan perempuan di DPR. Dalam Undang-undang Pemilu Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1 dinyatakan bahwa (Umaimah Wahid, 2012):

"Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mencalonkan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen".

Perlakuan khusus juga dilaksanakan dalam rangka pemberian kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat asli Papua. Salah satu butir dalam Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Papua adalah perlakuan khusus yang diberikan kepada anak-anak asli Papua di bidang pendidikan. Beberapa donor internasional telah membuat perlakuan khusus dalam pemberian beasiswa luar negeri kepada para calon siswa perempuan atau dari Indonesia bagian timur.

2. Pengarusutamaan gender

Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014, pengarusutamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi pembangunan selain pembangunan berkelanjutan dan tata-kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditempuh untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG yang diamanatkan dalam Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang belum berjalan seperti yang diharapkan. Dengan Inpres ini diinstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah agar mengintegrasikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan manajemen instansinya (KPPPA, 2002).

Kepedulian pemerintah untuk menghilangkan isu gender di berbagai bidang kehidupan telah ditunjukkan dengan berbagai upaya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan upaya percepatan kegiatan pembangunan dengan mengerahkan seluruh sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pembangunan dan membagi hasil pembangunan secara setara dan seimbang kepada seluruh rakyat baik laki-laki maupun perempuan. Upaya menghilangkan isu gender agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), pemerintah juga menyusun strategi PUG yang dituangkan antara lain dalam:

- a. Permen PP dan PA Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak; dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan data gender dan anak (KPPPA, 2009). Dalam Permen ini yang dimaksud dengan data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yg meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya dan kekerasan. Sementara itu data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
- b. Kesepakatan Bersama Nomor: 31/MEN. PP DAN PA/01/2011, Nomor: PM 6 TAHUN 2011 Tentang PUG dan PUHA di Bidang Perhubungan antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Perhubungan pada tanggal 19 Januari 2011.

Selain upaya di atas, setidaknya ada tiga kesepakatan tingkat global yang menjadi komitmen Pemerintah RI untuk dipatuhi, yaitu *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Beijing Platform for Actions* (BPA) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Komitmen ini akan dipantau dan dievaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan data terpilah.

- a. CEDAW: *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan); ditetapkan pada tahun 1979 oleh *The UN General Assembly*, terkenal dengan *International Bill of Rights for Women*. Ketetapan ini terdiri dari sebuah preambule dan 30 pasal, menjelaskan apa yang disebut dengan diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan agenda aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut. Untuk dapat melaporkan keberhasilan ini diperlukan data faktual yang dihimpun mengenai pemenuhan hak laki-laki dan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang pembangunan lainnya (UN, 1979). Kesepakatan internasional ini oleh Indonesia telah diratifikasi sebagai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.
- b. *Beijing Platform for Action* (BPA) diluncurkan sebagai hasil konferensi yang diselenggarakan oleh the United Nations pada tahun 1995 di Beijing. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi kemajuan sejak konferensi *the Nairobi World Conference on Women* tahun 1985. Pada konferensi tersebut telah teridentifikasi 12 bidang perhatian, antara lain kemiskinan, pendidikan/pelatihan, kesehatan, ekonomi, dan kekerasan terhadap perempuan. Keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kesepakatan ini hanya dapat dipantau dan dievaluasi melalui data yang responsif gender (UN, 1995).
- c. *Millenium Development Goals* (MDGs): Ada 8 sasaran pembangunan yang disepakati pada tahun 2000 oleh pimpinan 189 negara. Sasaran pembangunan milenium ini tidak hanya pencapaian pembangunan non-fisik, seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga yang menyangkut pembangunan fisik seperti kelestarian alam yang akan berbenturan kepentingan dengan pembangunan fisik, seperti bandara, pelabuhan,

terminal dan stasiun yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Salah satu sasaran MDGs lainnya adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran MDGs diukur dengan indikator kuantitatif dengan nilai target yang sudah ditetapkan pada tahun 2015. Untuk melihat status capaian sasaran kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, keterlibatan atau partisipasi laki-laki/perempuan dalam tiga bidang penting diprioritaskan. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pendidikan, yang diukur dengan indikator rasio angka partisipasi murni di berbagai jenjang pendidikan, keterlibatan laki-laki/perempuan dalam ketenagakerjaan yang diukur dengan kontribusi perempuan dalam pekerjaan nafkah (*wage employment*) di sektor non-pertanian, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik yang diukur dengan persentase anggota DPR. Dalam melokalkan MDGs ini, Indonesia menggunakan juga keterlibatan laki-laki/perempuan dalam bidang eksekutif dan yudikatif (Bappenas, 2011).

Dalam merevisi indikator untuk menilai pencapaian MDGs tahun 2008 sebagai pengganti indikator versi 2000, UN juga menekankan bahwa seluruh indikator MDGs yang disusun perlu semaksimal mungkin dirinci menurut wilayah kota/desa dan laki-laki/perempuan. Oleh karena itu data terpilah yang dirinci menurut jenis kelamin sangat penting untuk dikumpulkan di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan komitmen dunia yang besar terhadap ketersediaan data terpilah untuk mengukur adanya kesetaraan dan keadilan gender.

B. Pengertian Gender dan Isu Gender

Pengertian jenis kelamin dan gender seringkali dicampuradukkan, demikian pula pengertian gender sering disamakan dengan perempuan. Berikut beberapa definisi yang sering digunakan untuk memperjelas garis batas antara jenis kelamin, gender dan perempuan (Bhasin, 2002; KPPPA, 2009, 2011)

1. Jenis kelamin adalah ciri biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi fisiknya. Perempuan mempunyai alat kelamin yang mendukung fungsi reproduksi, seperti hamil, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki hanya mempunyai alat kelamin tetapi tidak dapat hamil, melahirkan dan menyusui.
2. Gender adalah ciri sosial budaya yang membedakan maskulin dan feminin berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat, seperti fungsi, peran, tanggung jawab, sikap dan status. Sifat sosial budaya semacam ini dapat berbeda dan berubah menurut waktu, etnis, dan tempat.
3. Bias gender adalah pandangan atau visi yang menyimpang tentang gender yang berpihak pada jenis kelamin tertentu.
4. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender yang biasanya cenderung menguntungkan atau merugikan salah satu kelompok tersebut. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi objektif di lapangan.
5. Kesenjangan gender di bidang perhubungan adalah adanya perbedaan akses atau peluang di bidang perhubungan sehingga berdampak pada adanya perbedaan partisipasi, kontrol, yang pada akhirnya mengakibatkan perbedaan dalam menikmati hasil pembangunan di bidang perhubungan.
6. Keadilan gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.

C. Pengertian Data Terpilah dan Data Gender

Upaya menggambarkan ciri atau sifat sekelompok penduduk atau obyek lainnya dengan indeks, statistik atau indikator secara umum bermanfaat untuk meringkas kumpulan angka-angka atau atribut-atribut yang sangat banyak jumlahnya. Besaran-besaran tersebut sangat berguna sebagai ringkasan data dalam menggeneralisasi ciri kelompok. Namun demikian ringkasan data yang terlalu global dan luas akan menyembunyikan ciri khas atau ciri spesifik dari kelompok penduduk atau objek yang diamati. Untuk itu diperlukan ringkasan data yg lebih sempit atau terpilah.

Data terpilah disusun untuk dapat membedakan ciri-ciri atau atribut-atribut umum dari masing-masing kelompok penduduk atau objek yang diteliti. Dengan demikian data terpilah yang disusun dapat membuka wawasan tentang ada tidaknya perbedaan atau kesenjangan antar-kelompok penduduk atau objek yang diteliti. Baik data kuantitatif (data yang terukur) maupun kualitatif (yang tidak terukur) dapat dipilah, dan pemilahan perlu disesuaikan dengan kepentingan. Secara ringkas beberapa istilah yang terkait dengan data terpilah diuraikan sebagai berikut (KPPPA, 2009, 2011, Suyatno, 2011):

1. Data terpilah adalah nilai hasil pengamatan/pengukuran suatu variabel yang telah dikelompokkan menurut berbagai ciri, seperti jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu.
2. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau kualitatif yang sudah dirinci menurut jenis kelamin. Untuk selanjutnya, dalam panduan ini, pengelompokan data tersebut dinamakan data terpilah.
3. Data gender adalah serangkaian kelompok data terpilah yang dirinci tidak hanya menurut jenis kelamin, tetapi juga ciri lainnya seperti status, peran, kondisi dan kedudukannya dalam masyarakat. Dengan demikian akan dapat diketahui hubungan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.
4. Analisis gender adalah analisis data kuantitatif maupun kualitatif untuk mengidentifikasi dan memahami hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. pembagian kerja atau peran serta status laki-laki dan perempuan;
 - b. akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi terhadap proses pembangunan dan manfaat hasil pembangunan yang dinikmati laki-laki dan perempuan.

Analisis gender bermanfaat untuk menyusun analisis situasi dan analisis kebijakan

D. Tujuan Penyusunan Buku Pedoman

Buku Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang Responsif Gender merupakan suplemen dari buku Panduan Umum Penyusunan Data Terpilah yang dikeluarkan oleh Kementerian PP dan PA. Buku ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan dalam penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender dalam lingkup perhubungan. Mengingat luasnya lingkup Kementerian Perhubungan, rujukan ini menjadi sangat penting agar setiap unit dapat menyusun data terpilah secara baku dan konsisten, sehingga data dari masing-masing unit dapat digabungkan dan dapat diperbandingkan. Manfaat lain dari adanya pembakuan metodologi penghitungan yang disajikan dalam buku pedoman adalah kemungkinan disusunnya *trend* data antar tahun. Dengan *trend* data gender ini akan dapat dipantau status capaian keadilan dan kesetaraan gender. Dalam jangka panjang, dokumen ini perlu ditinjau ulang untuk melihat apakah masih relevan untuk dipakai atau sudah harus diperbaharui.

E. Manfaat Data Terpilah

Data terpilah diharapkan dapat bermanfaat untuk menyusun analisis gender bidang perhubungan agar dapat mendukung kegiatan Kementerian Perhubungan; antara lain dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), yang ditunjukkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan penyusunan reformulasi kebijakan pembangunan perhubungan agar responsif gender dengan menggunakan alat analisis antara lain Gender Analysis Pathway (GAP).

A. Data Partisipasi SDM dalam Pembangunan Perhubungan

Dengan asumsi bahwa banyaknya laki-laki atau perempuan yang ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau menjadi pelaku pembangunan akan memberi warna dalam pengintegrasian aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam proses manajemen perhubungan, maka data tentang pelaku pembangunan perhubungan ini perlu ditampilkan dalam buku data terpilah.

1. Data SDM Umum

Selain dipilah menurut jenis kelamin, data SDM umum perlu dipilah juga menurut ciri lain seperti eselon, golongan kepegawaian, struktural/fungsional, dan pendidikan. Dengan melihat ciri-ciri tersebut akan dapat diperkirakan seberapa besar partisipasi SDM laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Data keterlibatan SDM laki-laki dan perempuan di Kementerian dalam pembangunan perhubungan secara umum dapat diperoleh dari Biro Kepegawaian di tiap satuan kerja setingkat Eselon I.

2. Data SDM Khusus

Dalam hal-hal tertentu, misalnya berkaitan dengan kegiatan khusus seperti pemantauan, evaluasi dan penelitian di mana petugas utama pemantauan, evaluasi dan penelitian tidak selalu pejabat struktural melainkan pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu, maka data pelaku pembangunan ini penting untuk ditampilkan secara tersendiri dan dirinci menurut jenis kelamin. Data keterlibatan SDM dalam kegiatan khusus Kementerian dapat diperoleh dari setiap unit utama.

B. Data Pemanfaat Hasil Pembangunan Perhubungan

Bila strategi pembangunan melalui PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan aspirasi, status, peran, kondisi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan, maka mereka akan sama-sama menikmati hasil pembangunan tersebut secara seimbang. Hasil atau *output* pembangunan perhubungan dapat berbentuk peningkatan kualitas manusia, bangunan fisik, dokumen/aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan perhubungan dan hasil pengawasan. Untuk menilai apakah hasil pembangunan dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan, maka output pembangunan harus dilihat apakah sudah responsif gender atau tidak. Data pemanfaat hasil pembangunan atau data kelompok sasaran program pembangunan perhubungan dapat diperoleh dari unit utama yang bersangkutan.

1. Peningkatan kualitas manusia

Kegiatan peningkatan kualitas manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu peningkatan kualitas SDM Kementerian dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM adalah antara lain kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan, diklat teknis, diklat administrasi, dan kegiatan tugas belajar dalam dan luar negeri. Sementara itu yang termasuk dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat misalnya penyuluhan dan sosialisasi kepada kelompok masyarakat tertentu. Untuk menyajikan data tentang peningkatan kualitas manusia ini tidak sulit karena sasaran kegiatannya adalah manusia yang dapat dirinci menurut jenis kelamin.

2. Bangunan fisik

Bila dilihat dari fasilitas yang tersedia di dalamnya, suatu bangunan fisik dapat dinilai responsif gender atau tidak. Fasilitas yang pertama kali perlu ditengarai adalah tersedianya ruang ASI (*nursery room*) di mana seorang karyawati yang sedang menyusui dapat memompa dan memberi ASI pada bayinya. Fasilitas berikutnya adalah tersedianya kamar mandi perempuan yang cukup air dan kebutuhan lainnya, seperti gantungan tas dan plastik pembungkus pembalut wanita (*sanitary napkin*). Fasilitas lainnya yang perlu dilihat adalah tangga, dimana ukuran dan model tangga perlu mendapat perhatian juga. Data tentang fasilitas yang ada dalam bangunan fisik dapat diperoleh dari Sekeretaryat Jendral (Setjen).

3. Dokumen/pengaturan

Dokumen pengaturan dapat berupa pengaturan dari sisi teknis dan pengaturan terhadap manusia. Pengaturan teknis adalah netral gender dan isi dokumennya belum perlu disajikan terpisah, sedang dokumen pengaturan terhadap manusia perlu dianalisis apakah responsif gender atau tidak. Pengaturan juga dilakukan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan perhubungan. Oleh karena itu data tentang peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok sasaran perlu dirinci menurut jenis kelamin.

4. Hasil pengawasan

Dalam dokumen hasil pengawasan pembangunan perlu juga ada penilaian tentang manfaat hasil pembangunan yang diawasi terhadap laki-laki dan perempuan.

C. Data Pendukung Pembangunan Perhubungan

Kelompok data lain yang perlu disajikan adalah jenis data yang banyak berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perhubungan. Jenis data tersebut antara lain data tentang penduduk yang bekerja di sektor perhubungan dan data penumpang angkutan darat, kereta api, angkutan laut dan angkutan udara. Dua jenis data yang dibutuhkan di sini dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data lain yang perlu disajikan adalah data penumpang angkutan darat, kereta api, angkutan laut dan angkutan udara. Data yang ada ini tidak dirinci menurut jenis kelamin, sehingga untuk itu perlu usaha yang khusus. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan data tentang jenis kelamin penumpang, pengumpulan data secara sampel mungkin perlu dilakukan.

IDENTIFIKASI DATA MANFAAT PEMBANGUNAN YANG AKAN DIPILAH

Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan pembangunan melalui empat satuan kerja utama atau Direktorat Jendral (Ditjen), yaitu; Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Laut, dan Ditjen Perhubungan Udara. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut terdapat tiga satuan kerja pendukung, yaitu; Sekretariat Jendral (Setjen), Inspektorat Jendral (Irjen) dan dua lembaga yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (BP3) dan Badan Pengembangan SDM Perhubungan. *Output/outcome* pembangunan suatu kementerian/ lembaga (K/L), termasuk Kemenhub, dapat dilihat pada dokumen perencanaan seperti RPJMN, Renstra, dan RKL. Sebagai contoh akan disajikan identifikasi data yang dapat diangkat dari salah satu dokumen perencanaan, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 tahun 2010 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam matriks pada halaman berikutnya (Tabel 1), disajikan indikator kinerja utama Kemenhub yang dipilih dari dokumen di atas. *Output/outcome* yang diharapkan dari lingkup masing-masing satuan kerja setingkat Ditjen disajikan di kolom ke dua sedangkan indikator untuk menilai pencapaian program di kolom ke tiga. Di kolom yang terakhir adalah contoh kelompok indikator terpilih, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kelompok ini dipilih berdasarkan *Output/outcome* yang berpotensi menimbulkan atau melestarikan kesenjangan gender. Indikator utama yang dipilih untuk dipilah adalah indikator yang memenuhi syarat SMART, yaitu *simple, measurable, applicable/available, reliable, dan timely*. Artinya bahwa indikator terpilih yang dipilih sebaiknya merupakan indikator yang cara penghitungannya sederhana, terukur, layak/tersedia, terpercaya, dan tepat waktu.

Buku pedoman ini hanya mengambil contoh sebuah dokumen perencanaan yang umum pada tahun tertentu. Oleh karena itu satuan kerja setingkat Ditjen yang diangkat hanyalah berkaitan dengan program-program yang tertuang dalam Permen tersebut. Dalam upaya menyajikan data terpilih K/L perlu memilih dokumen perencanaan yang lebih rinci, kalau bisa sampai ke tingkat sub-kegiatan, agar indikator yang disajikan sebagai data terpilih lebih mudah diidentifikasi.

Bila manfaat pembangunan dari tahun ke tahun dapat dikumpulkan seperti ini, maka secara kumulatif kemajuan dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender dapat dipantau. Sebagai langkah awal, pendataan menyeluruh terhadap fasilitas angkutan apakah responsif gender atau tidak perlu dilakukan. Contoh: pendataan awal terhadap adanya fasilitas *nursery room* di bandara, terminal dan stasiun, belum perlu mencakup semua, namun cukup dimulai dari fasilitas pelabuhan/terminal/stasiun utama di ibukota provinsi dan kemudian secara bertahap mencakup fasilitas sampai pada tingkat yang lebih kecil. Berikut adalah kelompok indikator yang diangkat dari dokumen tentang penilaian kinerja seperti dalam contoh pada Tabel 1.

A. Sekretariat Jendral

Kelompok indikator kinerja utama yang dipilih dari daftar indikator kinerja utama terpilih adalah:

1. Tingkat kecukupan sumber daya aparatur perhubungan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan;
2. Tingkat kecukupan perundang-undangan di bidang perhubungan;
3. Tingkat kecukupan produk teknologi informasi (TI)

Kelompok indikator terpilah yang diusulkan, antara lain adalah:

1. Indikator kuantitatif tentang jumlah dan persentase SDM menurut jenis kelamin dan berbagai kriteria seperti pendidikan, golongan dan kemampuan teknis perhubungan,
2. Indikator kualitatif tentang adanya perundang-undangan yang responsif gender,
3. Indikator kuantitatif tentang jumlah dan persentase jenis data yang terpilah dalam *website* Kemenhub.

B. Inspektorat Jenderal

Kelompok indikator kinerja utama yang dipilih adalah:

1. Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dalam rangka mendorong terselenggaranya keamanan, keselamatan dan pelayanan transportasi

Kelompok indikator terpilah yang dapat diusulkan antara lain:

1. Jumlah dan persentase SDM pengawas menurut jenis kelamin (indikator kuantitatif)
2. Ada tidaknya laporan hasil pengawasan yang responsif gender (indikator kualitatif).

C. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Kelompok indikator kinerja utama yang dipilih adalah:

1. Indeks implementasi hasil litbang yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan perhubungan.
2. Persentase jumlah penelitian yang dipublikasikan.

Kelompok indikator terpilah yang diusulkan, antara lain adalah:

1. Jumlah dan persentase peneliti yang hasil penelitiannya dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan.
2. Jumlah dan persentase peneliti yang hasil penelitiannya dipublikasikan.

D. Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Kelompok indikator kinerja utama yang dipilih adalah:

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar BPSDM.

Kelompok indikator terpilah yang diusulkan antara lain adalah:

1. Jumlah dan persentase peserta didik menurut jenis pendidikan dan jenis kelamin.
2. Jumlah dan persentase peserta didik yang lulus menurut jenis pendidikan dan jenis kelamin.
3. Jumlah dan persentase pengajar/instruktur pendidikan dan latihan menurut jenis kelamin.
4. Jumlah dan persentase tenaga kependidikan menurut jenis kelamin.

E. Ditjen Perhubungan Darat

Kelompok indikator kinerja utama yang dipilih adalah:

1. Jumlah sertifikat kompetensi teknis dan sertifikat manajemen yang dikeluarkan.
2. Jumlah kegiatan dan penyediaan fasilitas pendukung kelembagaan.

Kelompok indikator terpilah yang diusulkan antara lain adalah:

1. Jumlah dan persentase penerima sertifikat menurut jenis kompetensi teknis dan jenis kelamin.
2. Jumlah dan persentase penerima sertifikat menurut jenis kompetensi manajemen dan jenis kelamin.
3. Jumlah dan persentase anggota kelompok sasaran dalam sosialisasi penyelenggaraan perhubungan menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin.

F. Ditjen Perkeretaapian

Kelompok indikator kinerja utama yang dipilih adalah:

1. Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang diterbitkan.
2. Jumlah sertifikat kelaikan sarana (lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus), prasarana (jalur, jembatan, fasilitas pengoperasian) dan sertifikat kecakapan SDM perkeretaapian (antara lain: masinis, asisten masinis, PPKA, juru penilik jalan, penjaga pintu perlintasan, kondektur, teknisi).
3. Jumlah kegiatan pembinaan (pengaturan, pengendalian, pengawasan) atas penyelenggaraan perkeretaapian.
4. Jumlah penumpang dan barang yang diangkut.

Kelompok indikator terpilah yang diusulkan antara lain adalah:

1. Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang diterbitkan yang responsif gender.
2. Jumlah dan persentase penerima sertifikat perkeretaapian menurut jenis kecakapan teknis dan jenis kelamin.
3. Jumlah dan persentase pembina/fasilitator pelatihan perkeretaapian menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin.
4. Jumlah dan persentase peserta pelatihan pembinaan perkeretaapian menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin.
5. Jumlah penumpang yang diangkut menurut jenis kelamin.

G. Ditjen Perhubungan Laut

Kelompok indikator kinerja utama yang dipilih adalah:

1. Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan dan peningkatan kompetensi pejabat pemeriksa keselamatan kapal (*marine inspector*).
2. Jumlah SDM yang memiliki sertifikat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi laut.
3. Jumlah SDM yang memiliki sertifikat diklat teknis.

Kelompok indikator terpilah yang diusulkan antara lain adalah:

1. Jumlah dan persentase SDM menurut jenis kelamin dan pendidikan, golongan, eselon, dsb.
2. Jumlah dan persentase SDM berkompetensi pemeriksa keselamatan kapal (*marine inspector*) menurut jenis kelamin.
3. Jumlah dan persentase SDM menurut jenis kelamin dan jenis pengetahuan tentang teknologi transportasi laut, dsb.
4. Jumlah dan persentase SDM yang memiliki sertifikat menurut jenis diklat teknis dan jenis kelamin.
5. Jumlah dan persentase pembina/fasilitator pelatihan menurut jenis pelatihan dan jenis kelamin.
6. Jumlah dan persentase penumpang menurut jenis kelamin.
7. Jumlah dan persentase korban kecelakaan menurut jenis kelamin.

H. Ditjen Perhubungan Udara

Kelompok indikator kinerja utama yang dipilih adalah:

1. Jumlah personil/ SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki kompetensi tertentu.
2. Jumlah personil yang mempunyai lisensi.

3. Tersedianya bandar udara dengan kapasitas kebutuhan jaringan dan kategori.
4. Jumlah komplain/ keluhan pengguna jasa transportasi udara per tahun.

Kelompok indikator terpilih yang diusulkan antara lain adalah:

1. Jumlah dan persentase SDM menurut jenis kelamin dan pendidikan, golongan, eselon, dsb.
2. Jumlah personil yang mempunyai lisensi menurut jenis kelamin.
3. Jumlah dan persentase personil yang mengajukan usaha penyelenggaraan transportasi udara menurut jenis kelamin.
4. Jumlah dan persentase bandar udara dengan fasilitas *nursery room* menurut jenis kelamin.
5. Jumlah dan persentase pengguna jasa yang menjadi korban gangguan keamanan di bandara menurut jenis kelamin.
6. Jumlah dan persentase pengguna jasa transportasi udara yang mengajukan komplain/ keluhan menurut jenis kelamin

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Terpilih (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.85 Tahun 2010) dan Usulan Indikator Terpilih Kementerian Perhubungan

A SEKRETARIAT JENDERAL			
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama Terpilih	Indikator Terpilih
1.	Terwujudnya pengelolaan SDM aparatur melalui pendekatan manajemen SDM yang profesional	Tingkat kecukupan sumber daya aparatur perhubungan yang memiliki kompetensi di sesuaikan dengan standar kompetensi yang diperlukan	Jumlah dan persentase SDM menurut jenis kelamin dan pendidikan, golongan, eselon, dsb
2.	Terwujudnya reformasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan	Tingkat kecukupan perundang-undangan di bidang perhubungan	Adanya perundang-undangan yang responsif gender
3.	Terwujudnya pengembangan produk komunikasi dan informasi yang handal dan dinamis	Tingkat kecukupan produk teknologi informasi (TI)	Jumlah dan persentase jenis data yang terpilih dalam <i>website</i> Kemenhub
B INSPEKTORAT JENDERAL			
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Terpilih
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diindikasikan dengan berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran pejabat yang paling atas	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dalam rangka mendorong terselenggaranya keamanan, keselamatan dan pelayanan transportasi	Jumlah dan persentase SDM pengawas menurut jenis kelamin dan pendidikan, golongan, eselon, dsb
			Hasil temuan: Pelaku kasus penyimpangan menurut jenis kelamin dan pendidikan, golongan, eselon, dsb
C BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAM			
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Terpilih
1.	Meningkatnya kuantitas penelitian dan pengembangan perhubungan	Indeks implementasi hasil litbang yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan perhubungan	Jumlah dan persentase peneliti yang hasil penelitiannya dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan perhubungan
2.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan perhubungan	Persentase jumlah penelitian yang dipublikasikan	Jumlah dan persentase peneliti yang hasil penelitiannya dipublikasikan

D BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN			
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Terpilah
1.	Terwujudnya SDM aparatur perhubungan yang profesional, kompeten dan memiliki tanggung jawab, dan integritas yang tinggi dalam melakukan tugasnya	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar BPSDM	Jumlah dan persentase peserta pendidikan dan latihan menurut jenis pendidikan dan jenis kelamin
2.	Terwujudnya lulusan diklat di bidang transportasi yang mempunyai kompetensi tinggi BPSDM dan berstandar internasional, profesional serta didukung fisik dan jasmani yang prima		Jumlah dan persentase peserta pendidikan dan latihan yang lulus menurut jenis pendidikan dan jenis kelamin
3.	Terwujudnya kurikulum dan silabi menghasilkan jumlah lulusan diklat berbasis kompetensi (<i>harmonization, compliance</i> dan yang lulus program pendidikan, demand <i>fulfillment curriculum</i>) yang mengikuti perkembangan IPTEK		
4.	Tersedianya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas yang tinggi dan profesional serta didukung oleh fisik dan jasmani yang prima		Jumlah dan persentase pengajar/ instruktur pendidikan dan latihan menurut jenis kelamin Jumlah dan persentase tenaga kependidikan menurut jenis kelamin
5.	Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi tinggi, yang memenuhi standar nasional dan internasional		Jumlah dan persentase pengajar/ instruktur pendidikan dan latihan bidang IT menurut jenis kelamin
6.	Terwujudnya sistem dan metode penyelenggaraan DIKLAT yang berbasis teknologi informasi		
7.	Terwujudnya lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang mandiri dan profesional, diarahkan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Pengembangan kemitraan baik dengan swasta nasional maupun asing (<i>public private partnership</i>)		
8.	Terwujudnya ketentuan dan peraturan perundangan di bidang SDM transportasi yang memenuhi ketentuan (konvensi) internasional		

E DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT			
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Terpilah
1.	Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional	Jumlah fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan untuk meningkatkan fungsi sarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Jumlah dan persentase penumpang menurut jenis kelamin Jumlah dan persentase korban kecelakaan menurut jenis kelamin
2.	Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi, kelembagaan, SDM, dan peraturan perundangan / <i>regulatory reform</i> transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Jumlah sertifikat kompetensi teknis dan sertifikat manajemen yang dikeluarkan Jumlah kegiatan dan penyediaan fasilitas pendukung kelembagaan	Jumlah dan persentase penerima sertifikat menurut jenis kompetensi teknis dan jenis kelamin Jumlah dan persentase penerima sertifikat menurut jenis kompetensi manajemen dan jenis kelamin Jumlah dan persentase anggota kelompok sasaran sosialisasi dalam penyelenggaraan perhubungan menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin
3.	Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai	Jumlah sarana prasarana keperintisan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan yang menjangkau kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan	
F DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN			
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Terpilah
1.	Meningkatnya peran sebagai regulator pemerintah di bidang perkeretaapian	1) Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang diterbitkan	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang diterbitkan yang responsif gender
		2) Jumlah perizinan (antara lain: izin usaha, izin pembangunan, izin operasi baik sarana maupun prasarana) dan ekomendasj/ persetujuan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian	
2.	Meningkatnya keandalan dan keselamatan pengoperasian perkeretaapian	3) Jumlah sertifikat kelaikan sarana (lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus), prasarana (jalur, jembatan, fasilitas pengope rasian) dan sertifikat kecakapan SDM perkeretaapian (antara lain: masinis, asisten rnasinis, PPKA, Juru Penilik Jalan, penjaga pintu perlintasan, kondektur, teknisi)	Jumlah dan persentase penerima sertifikat perkeretapian menurut kecakapan teknis dan jenis kelamin
		Jumlah kegiatan pembinaan (pengaturan, pengendalian, pengawasan) atas penyelenggaraan perkeretaapian	Jumlah dan persentase peserta pembinaan/ pelatihan perkeretapian menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin Jumlah dan persentase pembina/ fasilitator pelatihan perkeretapian menurut jenis pelatihan dan jenis kelamin

3.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kinerja Pelayanan Angkutan Kereta Api	Jumlah sarana (pengadaan/modifikasi/rehabilitasi), lintas pelayanan (penambahan/perubahan rute), dan Jumlah penumpang dan barang yang diangkut	Jumlah penumpang yang diangkut menurut jenis kelamin
G DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT			
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Terpilah
1.	Meningkatkan pelayanan keselamatan persentase. Mengukur tingkat pemenuhan pelayaran dan keamanan transportasi sarana dan prasarana laut melalui peningkatan kapasitas keselamatan pelayaran sarana dan prasarana	Tingkat kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana, pengaturan dan sistem dan prosedur (sispro)	
2.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan persentase. Mengukur tingkat pemenuhan Laut Nasional melalui peningkatan kelaiklautan kapal dalam rangka kapasitas sarana dan prasarana	Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan dan peningkatan kompetensi pejabat pemeriksa keselamatan kapal (<i>marine inspector</i>)	Jumlah dan persentase SDM berkompetensi sebagai pemeriksa keselamatan kapal (<i>marine inspector</i>) menurut jenis kelamin
3.	Meningkatnya pelayanan persentase Mengukur kinerja pembinaan Kepelabuhan Nasional melalui angkutan laut nasional peningkatan kapasitas sarana dan prasarana	a. Persentase peningkatan pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri dan luar negeri b. Persentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional c. Persentase peningkatan kinerja angkutan laut perintis	Jumlah penumpang yang diangkut menurut jenis kelamin
4.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi laut	Jumlah SDM yang memiliki sertifikat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi laut	Jumlah dan persentase SDM menurut jenis kelamin dan pendidikan, golongan, eselon, dsb Jumlah dan persentase SDM menurut jenis kelamin dan pengetahuan tentang teknologi transportasi laut. dsb
5.	Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut	Penurunan <i>turn-around time</i> rata-rata kapal dipelabuhan utama dan pengumpul penyelenggaraan pelabuhan	
6.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara di Sektor Transportasi Laut	Jumlah SDM yang memiliki sertifikat diklat teknis	Jumlah dan persentase SDM yang memiliki sertifikat menurut jenis diklat teknis dan jenis kelamin Jumlah dan persentase pembina/fasilitator pelatihan menurut jenis pelatihan dan jenis kelamin

H DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA			
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Terpilah
1.	Tersedianya kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Ditjen Perhubungan Udara dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal dan berdaya saing	1. Jumlah personil/ SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki kompetensi tertentu	Jumlah dan persentase SDM menurut jenis kelamin dan pendidikan, golongan, eselon, dsb
		2. Jumlah personil yang mempunyai lisensi	Jumlah persentase personil yang mempunyai lisensi menurut jenis kelamin
2.	Terwujudnya peluang yang adil bagi masyarakat dan swasta untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan transportasi udara	3. Persentase pengajuan partisipasi masyarakat/swasta dalam usaha penyelenggaraan transportasi udara berdasarkan NPK	Jumlah dan persentase personil yang mengajukan usaha penyelenggaraan transportasi udara menurut jenis kelamin
3.	Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana transportasi udara sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan dukungan bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan (<i>sustainable growth</i>)	4. Tersedianya bandar udara dengan kapasitas kebutuhan jaringan dan kategori	Jumlah dan persentase bandar udara dengan fasilitas <i>nursery room</i> menurut jenis kelamin.
		5 Jumlah SBU yang diterbitkan	
4.	Terjaminnya pelayanan jasa mengukur kinerja pembinaan transportasi udara yang berkualitas, transportasi udara dalam selamat, aman dan nyaman	6. Persentase pemenuhan pedoman dan standar pengoperasian bandar udara	
		7. Jumlah kejadian/ gangguan keamanan di bandara per tahun	Jumlah dan persentase pengguna jasa yang menjadi korban gangguan keamanan di bandara menurut jenis kelamin
		8. Jumlah komplain/ keluhan pengguna jasa transportasi udara per tahun	Jumlah dan persentase pengguna jasa transportasi udara yang mengajukan komplain/ keluhan menurut jenis keluhan dan jenis kelamin

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.85 tahun 2010 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Data yang disajikan dalam buku data terpilah disarankan dalam tiga bentuk, yaitu dalam bentuk tabel, narasi dan gambar. Pembaca perlu dipandu dalam mengartikan tabel dengan penjelasan dalam bentuk narasi. Adanya isu gender penting yang ditemukan dari tabel perlu ditonjolkan dalam narasi maupun gambar. Data terpilah yang diusulkan untuk disajikan dijabarkan dari contoh indikator terpilah yang diangkat dari Permenhub No. PM 85 tahun 2010 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

A. Penyajian Tabel

Tabel bermanfaat untuk menyajikan ringkasan data dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok yang menjadi objek pembahasan disusun dalam deretan baris dan kolom yang membentuk beberapa sel. Masing-masing sel berisi angka yang menunjukkan jumlah objek yang berciri seperti apa yang ditulis dalam kolom dan baris. Disamping menyajikan jumlah dalam angka absolut, data perlu juga disajikan dalam persentase sehingga menjadi indikator yang dapat diperbandingkan. Berbeda dengan angka absolut yang perbedaannya dipengaruhi oleh jumlah populasi, angka persentase, secara relatif mewakili kontribusi dan partisipasi per kelompok, laki-laki maupun perempuan yang langsung dapat diperbandingkan.

Data pada umumnya bersifat dinamis yang dapat berubah menurut waktu. Agar data dapat menggambarkan potret perubahan yang terjadi, maka data tidak disajikan dalam tahun tunggal melainkan beberapa tahun, sedikitnya tiga tahun. Dengan demikian kecenderungan yang terjadi selama tiga tahun terakhir mengenai komposisi atau kontribusi maupun partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan perhubungan dapat dipantau.

Penyajian bentuk tabel per Direktorat Jendral (Ditjen) seperti pada Tabel 2 dapat menunjukkan komposisi atau distribusi SDM dalam angka nominal menurut jenis kelamin, masing-masing laki-laki (Kolom 3), perempuan (Kolom 4) dan pada Kolom (5) disajikan angka gabungan atau jumlah laki-laki dan perempuan. Kemudian pada tiga kolom terakhir, tabel dilengkapi dengan persentase komposisinya per satuan kerja. Dalam penghitungan ini masing-masing jumlah SDM per satuan kerja bernilai 100%. Pada Kolom 6 dan 7 disajikan angka persentase yang menunjukkan kontribusi laki-laki dan perempuan dari sisi jumlah SDM. Indikator persentase dapat dihitung bila ingin diketahui kontribusi laki-laki atau perempuan dalam suatu kegiatan atau kelompok tertentu saja. Untuk menyusun indikator ini jumlah keseluruhan (populasi) laki-laki atau perempuan tidak diperlukan. Cara penghitungan dapat dilihat dalam setiap sel pada Tabel 2.

Tabel 3 adalah contoh bentuk tabel per Ditjen yang dapat menggambarkan tingkat atau angka partisipasi per masing-masing jenis kelamin dalam berbagai satuan kerja atau kegiatan. Indikator ini telah dipakai untuk berbagai upaya memantau partisipasi laki-laki atau perempuan di berbagai bidang. Sebagai contoh adalah angka partisipasi sekolah untuk mengukur peran laki-laki atau perempuan dalam kegiatan sekolah dan angka partisipasi angkatan kerja dalam upaya mengukur peran perempuan dalam ketenagakerjaan. Dalam penghitungan ini partisipasi seluruh anggota kelompok masing-masing jenis kelamin dihitung 100%. Bila indikator angka partisipasi laki-laki atau perempuan dalam berbagai kegiatan/ satuan kerja akan disajikan maka akan dapat diketahui perbandingan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Cara penghitungan dapat dilihat dalam setiap sel pada Tabel 3.

Tabel 2. Komposisi SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon II	Lk	Pr	Lk+Pr	%Lk	%Pr	%Lk+Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Satuan Kerja 1	Nlk1	Np1	Nlk1+Np1	$Nlk1 / (Nlk1+Np1)$	$Np1 / (Nlk1+Np1)$	$(Nlk1+Np1) / (Nlk1+Np1) = (100\%)$
2.	Satuan Kerja 2	Nlk2	Np2	Nlk2+Np2	$Nlk2 / (Nlk2+Np2)$	$Np2 / (Nlk2+Np2)$	$(Nlk2+Np2) / (Nlk2+Np2) = (100\%)$
3.	Satuan Kerja 3	Nlk3	Np3	Nlk3+Np3	$Nlk3 / (Nlk3+Np3)$	$Np3 / (Nlk3+Np3)$	$(Nlk3+Np3) / (Nlk3+Np3) = (100\%)$
4.	Satuan Kerja 4	Nlk4	Np4	Nlk4+Np4	$Nlk4 / (Nlk4+Np4)$	$Np4 / (Nlk4+Np4)$	$(Nlk4+Np4) / (Nlk4+Np4) = (100\%)$
5. Dst....	Satuan Kerja 5	Nlk5	Np5	Nlk5+Np5	$Nlk5 / (Nlk5+Np5)$	$Np5 / (Nlk5+Np5)$	$(Nlk5+Np5) / (Nlk5+Np5) = (100\%)$
Jumlah		Nlk _j	Np _j	Nlk _j +Np _j	$Nlk_j / (Nlk_j+Np_j)$	$Np_j / (Nlk_j+Np_j)$	$(Nlk_j+Np_j) / (Nlk_j+Np_j) = (100\%)$

Keterangan: Nlki = jumlah laki-laki direktorat ke i, Npi = jumlah perempuan direktorat ke i

Bila penyajian yang diinginkan adalah gambaran komposisi dan partisipasi maka diperlukan penyajian seperti Tabel 2 dan Tabel 3. Penyajian dapat difisienkan dengan menggabungkan beberapa sel dalam tabel menjadi satu. Untuk itu tabel dapat dibuat untuk menggambarkan komposisi sekaligus partisipasi SDM dalam satu tabel.

Tabel 3. Angka Partisipasi SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon II	Lk	Pr	Lk+Pr	%Lk	%Pr	%Lk+Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Satuan Kerja 1	Nlk1	Np1	Nlk1+Np1	$Nlk1 / Nlk_j$	$Np1 / Np_j$	$(Nlk1+Np1) / (Nlk_j+Np_j)$
2.	Satuan Kerja 2	Nlk2	Np2	Nlk2+Np2	$Nlk2 / Nlk_j$	$Np2 / Np_j$	$(Nlk2+Np2) / (Nlk_j+Np_j)$
3.	Satuan Kerja 3	Nlk3	Np3	Nlk3+Np3	$Nlk3 / Nlk_j$	$Np3 / Np_j$	$(Nlk3+Np3) / (Nlk_j+Np_j)$
4.	Satuan Kerja 4	Nlk4	Np4	Nlk4+Np4	$Nlk4 / Nlk_j$	$Np4 / Np_j$	$(Nlk4+Np4) / (Nlk_j+Np_j)$
5. Dst....	Satuan Kerja 5	Nlk5	Np5	Nlk5+Np5	$Nlk5 / Nlk_j$	$Np5 / Np_j$	$(Nlk5+Np5) / (Nlk_j+Np_j)$
Jumlah		Nlk _j	Np _j	Nlk _j +Np _j	$Nlk_j / Nlk_j = (100\%)$	$Np_j / Np_j = (100\%)$	$(Nlk_j+Np_j) / (Nlk_j+Np_j) = (100\%)$

Keterangan: Nlki = jumlah laki-laki direktorat ke i, Npi = jumlah perempuan direktorat ke i

j = jumlah seluruh direktorat di ditjen

Tabel 4 merupakan salah satu alternatif cara penyajian tabel per Ditjen yang dapat menggambarkan komposisi dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Dalam tabel tersebut disajikan pula cara penghitungan komposisi dan angka partisipasi.

B. Penyajian Narasi

Penyajian data dalam bentuk narasi atau uraian ringkas dalam buku data terpilah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang cara membaca tabel, arti data yang mungkin dapat menggambarkan isu gender, dan sepanjang memungkinkan mencari faktor-faktor yang terkait isu tersebut.

Tabel 4. Komposisi dan Angka Partisipasi SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon I dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon II	Lk	Pr	Lk+Pr	%Lk	%Pr	%Lk+Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Satuan Kerja 1	NIk1 [NIk1/ (NIk1+Np1)]	Np1 [Np1/ (NIk1+Np1)]	NIk1+Np1 [(NIk1+Np1)/ (NIk1+Np1)]= (100%)	NIk1/ NIkj	Np1/ Npj	(NIk1+Np1)/ (NIkj+Npj)
2.	Satuan Kerja 2	NIk2 [NIk2/ (NIk2+Np2)]	Np2 [Np2/ (NIk2+Np2)]	NIk2+Np2 [(NIk2+Np2)/ (NIk2+Np2)]= (100%)	NIk2/ NIkj	Np2/ Npj	(NIk2+Np2)/ (NIkj+Npj)
3.	Satuan Kerja 3	NIk3 [NIk3/ (NIk3+Np3)]	Np3 [Np3/ (NIk3+Np3)]	NIk3+Np3 [(NIk3+Np3)/ (NIk3+Np3)]= (100%)	NIk3/ NIkj	Np3/ Npj	(NIk3+Np3)/ (NIkj+Npj)
4.	Satuan Kerja 4	NIk4 [NIk4/ (NIk4+Np4)]	Np4 [Np4/ (NIk4+Np4)]	NIk4+Np4 [(NIk4+Np4)/ (NIk4+Np4)]= (100%)	NIk4/ NIkj	Np4/ Npj	(NIk4+Np4)/ (NIkj+Npj)
5. Dst....	Satuan Kerja 5	NIk5 [NIk5/ (NIk5+Np5)]	Np5 [Np5/ (NIk5+Np5)]	NIk5+Np5 [(NIk5+Np5)/ (NIk5+Np5)]= (100%)	NIk5/ NIkj	Np5/ Npj	(NIk5+Np5)/ (NIkj+Npj)
Jumlah		NIkj [NIkj/ (NIkj+Npj)]	Npj [Npj/ (NIkj+Npj)]	NIkj+Npj [(NIk1+Np1)/ (NIkj+Npj)]= (100%)	NIkj/ NIkj = (100%)	Npj/ Npj = (100%)	(NIkj+Npj)/ (NIkj+Npj)= (100%)

Contoh interpretasi/narasi pada Tabel 2:

Bila dilihat dari angka nominal, Tabel 2 menunjukkan bahwa komposisi SDM menurut jenis kelamin di Direktorat 1 terdiri dari NIk orang SDM laki-laki dan Np orang SDM perempuan ataupersen adalah SDM laki-laki danpersen adalah SDM perempuan. , dan seterusnya.....

Contoh interpretasi/narasi Tabel 3:

Pada Tabel 3 dapat dilihat adanya perbedaan partisipasi per kelompok jenis kelamin antar direktorat maupun antar kelompok jenis kelamin dalam masing-masing direktorat di lingkungan Ditjen. Dari seluruh SDM laki-laki dalam Ditjen, sebanyak NIk2/NIkj orang ataupersen bekerja di Direktorat 2. Tingkat partisipasi ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan partisipasi SDM laki-laki di Direktorat 5 yang berkisar pada angka NIk5/NIkj orang ataupersen. Tingkat partisipasi SDM juga berbeda bila dari sisi perempuan. Jumlah perempuan dalam dua direktorat yang disebutkan di atas adalah berturut-turut Np2/Np orang ataupersen pada Direktorat 1 dan Np5/Npj orang ataupersen pada Direktorat 5,....., dan seterusnya.

Interpretasi/narasi untuk Tabel 4 merupakan narasi gabungan dari Tabel 2 dan Tabel 3. Dalam menentukan aspek mana yang akan ditonjolkan perlu dilihat dari urutan kepentingan bagi Kemenhub dan urutan lebarnya kesenjangan.

Penyajian dalam bentuk narasi termasuk penyajian hal-hal yang merupakan hasil pengambilan data kualitatif, ringkasan riset pustaka, dan hasil *rapid assessment* dan *focus group discussion* yang dapat menjelaskan isu gender yang sedang diamati.

C. Penyajian Gambar

Penyajian data dalam bentuk gambar sangat membantu pembaca secara cepat menerima pesan yang digambarkan data mengenai fakta di lapangan. Gambar lebih mudah dimengerti dan mudah dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan dari pada angka dan bentuk penyajian data yang lain. Hal ini disebabkan oleh manipulasi warna atau bentuk yang dibuat lebih cepat dan langsung menyentuh penglihatan tentang isu yang ada daripada melihat tabel dan narasi. Tidak semua tabel perlu digambarkan, tetapi dipilih tabel yang menunjukkan isu penting.

Beberapa software seperti *Excell* menyediakan seperangkat paket gambar seperti *barchart*, *linechart*, *piechart* dan *spider web*.

1. *Barchart* atau diagram batang biasa digunakan untuk membandingkan indikator seperti tingkat partisipasi laki-laki dan partisipasi perempuan;
2. *Linechart* atau grafik dapat digunakan untuk menggambarkan data *series*, seperti trend jumlah penerimaan pegawai laki-laki selama 3 tahun terakhir. Kalau grafik untuk laki-laki dan perempuan disandingkan dalam satu penyajian, maka akan dapat dilihat perbandingan antara jumlah penerimaan pegawai laki-laki dan perempuan;
3. *Piechart* atau diagram lingkaran dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi pegawai. Lingkaran yang menggambarkan total pegawai sebesar 100 persen dapat dibagi-bagi menjadi partisi-partisi, misalnya, pegawai laki-laki 60 persen dan pegawai perempuan 40 persen;
4. *Spider web* atau radar dapat digunakan untuk menyajikan pencapaian beberapa indikator pada tahun tertentu sekaligus dalam satu gambar;
5. Di samping itu penyajian gambar dalam bentuk peta tematik juga sangat membantu para pembaca melihat variasi nilai indikator antar-wilayah.

Berdasarkan kebutuhan untuk menilai pelaksanaan PUG sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dan hasil kinerja kementerian sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.85 tahun 2010 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berikut daftar usulan tabel data yang perlu disajikan. Sajian dalam bentuk narasi dan gambar dapat mengikuti alur tabel berikut dan disesuaikan dengan kebutuhan.

A. Daftar Tabel Pelaku Pembangunan

a. Umum per Satuan Kerja Setingkat Eselon I

1. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun
2. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Status (struktural/fungsional) dan Jenis Kelamin, Tahun
3. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun
4. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jenis Kelamin, Tahun
5. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun
6. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun
7. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Wilayah Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun
8. Jumlah dan Persentase SDM yang Baru Diterima menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun, dan

b. Khusus

Sekretariat Jenderal

Inspektorat Jenderal

1. Jumlah dan Persentase SDM Pengawas menurut Jenis Kelamin, Tahun....

Balitbang

1. Jumlah dan Persentase Peneliti menurut Satuan Kerja Eselon 2, Status Penelitian dan Jenis Kelamin, Tahun
2. Jumlah dan Persentase Peneliti menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Kajian/ Penelitian dan Jenis Kelamin, Tahun
3. Jumlah dan Persentase Peneliti yang Hasil Penelitiannya Dijadikan Sebagai Bahan Masukan dalam Perumusan Kebijakan/Program/Kegiatan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun....
4. Jumlah dan Persentase Peneliti yang Hasil Penelitiannya Dipublikasikan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun....
5. Jumlah dan Persentase Peneliti Peserta dan Penerima Hadiah Lomba Penelitian menurut Satuan Kerja Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun

Badan Pengembangan SDM Perhubungan

1. Jumlah dan Persentase Pengajar/Instruktur Pendidikan dan Latihan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Bidang Ilmu dan Jenis Kelamin, Tahun....
2. Jumlah dan Persentase Tenaga Kependidikan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Bidang Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun....

Ditjen Perhubungan Darat

1. Jumlah dan Persentase SDM dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Perhubungan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin, Tahun....

Ditjen Perkeretaapian

1. Jumlah dan Persentase Pembina/Fasilitator Pelatihan Perkeretaapian menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Pelatihan dan Jenis Kelamin, Tahun....

Ditjen Perhubungan Laut

1. Jumlah dan Persentase Pembina/Fasilitator Pelatihan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Pelatihan dan Jenis Kelamin, Tahun....
2. Jumlah dan Persentase SDM Berkompetensi Pemeriksa Keselamatan Kapal (*Marine Inspector*) menurut Jenis Kelamin, Tahun....
3. Jumlah dan Persentase SDM yang Mempunyai Pengetahuan tentang Teknologi Transportasi Laut menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Pengetahuan dan Jenis Kelamin, Tahun....

Ditjen Perhubungan Udara

1. Jumlah dan Persentase Personil yang Mempunyai Lisensi menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Kelamin, Tahun
2. Jumlah dan Persentase Pembina/Fasilitator Pelatihan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Pelatihan dan Jenis Kelamin, Tahun....

B. Daftar Tabel Pemanfaat Hasil Pembangunan:

a. Pembangunan SDM: Peningkatan Kualitas SDM/Karyawan

1. Jumlah dan Persentase SDM menurut Status Tugas Belajar S1/S2/S3 Di Dalam Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun....
2. Jumlah dan Persentase SDM menurut Keikutsertaan dalam Tugas Belajar S1/S2/S3 Di Luar Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun....
3. Jumlah dan Persentase SDM menurut Keikutsertaan dalam Berbagai Jenis Diklat Teknis menurut Jenis Kelamin, Tahun....
4. Jumlah dan Persentase SDM menurut Keikutsertaan dalam Berbagai Jenis Diklat Administrasi menurut Jenis Kelamin, Tahun
5. Jumlah dan Persentase SDM menurut Keikutsertaan dalam Berbagai Jenis Diklat Penjurusan Tk 1/2/3 menurut Jenis Kelamin, Tahun....
6. Jumlah dan Persentase SDM Peserta Rapat Koordinasi menurut Jenis Kelamin, Tahun
7. Jumlah dan Persentase SDM Peserta Sosialisasi menurut Jenis Kelamin, Tahun....
8. Jumlah dan Persentase SDM Peserta Diskusi/Workshop menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Diskusi/Workshop dan Jenis Kelamin, Tahun

b. Pembangunan SDM: Pemberdayaan masyarakat

1. Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Sosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi menurut Jenis Kelamin, Tahun....

2. Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Penyuluhan Lainnya menurut Jenis Kelamin, Tahun.....
3. Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Pendidikan Bidang Transportasi menurut Jenis Kelamin, Tahun
4. Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Pendidikan Kedinasan Bidang Transportasi menurut dan Jenis Kelamin, Tahun
5. Jumlah dan Persentase Pelamar Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Bidang Transportasi menurut Provinsi Asal dan Jenis Kelamin, Tahun
6. Jumlah dan Persentase Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Bidang Transportasi menurut Provinsi Asal dan Jenis Kelamin, Tahun
7. Jumlah dan Persentase Seluruh Mahasiswa Sekolah Tinggi Bidang Transportasi menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun
8. Jumlah dan Persentase Mahasiswa Sekolah Tinggi Bidang Transportasi yang Lulus menurut Provinsi Penempatan dan Jenis Kelamin, Tahun

c. Pembangunan Fisik

1. Jumlah dan Persentase Pelabuhan/Terminal/Stasiun Utama di Ibukota Provinsi menurut Ada/Tidaknya *Nursery Room*, Tahun

d. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perhubungan

Angkutan Darat

1. Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Darat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
2. Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Angkutan Darat menurut Provinsi Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
3. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan Darat di Terminal Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
4. Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Darat dan Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Terminal Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

Angkutan Kereta Api

5. Jumlah dan Persentase Penumpang Kereta Api menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
6. Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Kereta Api menurut Provinsi Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
7. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan Kereta Api di Stasiun Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
8. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Stasiun Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

Angkutan Laut

9. Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Laut menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
10. Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Angkutan Laut menurut Provinsi Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
11. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan Laut di Pelabuhan Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
12. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Pelabuhan Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

Angkutan Udara

13. Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Udara menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
14. Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Angkutan Udara menurut Provinsi Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
15. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan Udara di Bandara Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
16. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Bandara Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
17. Jumlah dan Persentase Penduduk Pemegang dan Pemohon Lisensi Usaha Bidang Transportasi Udara menurut Jenis Kelamin, Tahun

f. Hasil Analisis Kualitatif terhadap dokumen/peraturan (dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi)

1. Jumlah dan Persentase Dokumen/Peraturan yang Dianalisis menurut Responsif /Tidaknya terhadap Gender, Tahun....

C. Daftar Tabel Pendukung Pembangunan Perhubungan

1. Jumlah dan Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun.....
2. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Umur dan Jenis Kelamin, Tahun.....
3. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
4. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
5. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
6. 6 Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Rata-rata Jam Kerja per Minggu dan Jenis Kelamin, Tahun.....
7. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Skala Perusahaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
8. Jumlah dan Persentase Pekerja Perusahaan Angkutan menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
9. Jumlah dan Persentase Pekerja Usaha Angkutan Rumah Tangga, dan Jenis Kelamin, Tahun.....

VI PENUTUP

Di samping dapat dipakai sebagai acuan setiap satuan kerja di lingkungan Kemenhub, buku pedoman ini diharapkan dapat dipakai juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perhubungan yang akan menyusun data terpilah, sehingga data yang dihasilkan dapat dibandingkan dan digabung dengan SKPD yang lain menjadi satu kompilasi data terpilah provinsi dan nasional. Data gabungan ini sangat bermanfaat untuk kebijakan nasional dan bila disusun secara teratur, suatu kecenderungan situasi antar tahun juga dapat dihasilkan.

Karena kegiatan kementerian dan SKPD sifatnya dinamis, maka contoh-contoh yang dipakai dalam buku pedoman ini mungkin sudah tidak sesuai, sehingga dokumen ini perlu selalu diperbaharui.

Kritik dan saran diharapkan dari pembaca demi peningkatan daya guna dari dokumen ini. Untuk ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

- Bappenas, CIDA, WSPIL. 2001. Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis untuk Perencanaan Pembangunan.
- Bappenas. 2011. Report on The Achievement of The millennium Development Goals in Indonesia 2010..
- Bhasin Kamala. 2000. Understanding Gender (Memahami Gender) Diterjemahkan oleh Moh. Zaki Husein, Teplok Press.
- Dr. Umaimah Wahid. 2012. Gerakan Perempuan Affirmative Action Kuota 30
- Dr. Umaimah Wahid. 2012. Otonomi Daerah dan Komunikasi Politik Kandidat Anggota Parlemen Pemilu 2009 (Analisis Gramscian Terhadap Affirmative Action, Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen) Di Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta
- Ir. Suyatno M.Kes. 2011,. Analisis Gender
- Kementerian Perhubungan. 2010. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.85 tahun 2010 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KPPPA. 2011. Panduan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan: Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kementerian dan Lembaga (K/L)
- KPPPA. 2010. Panduan Pelaksanaan INPRES No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- KPPPA. 2010. Panduan Umum Penyusunan data terpilah dengan Analisis Gender.
- KPPPA. 2010. Peraturan Menteri PP dan PA No. 6 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
- United Nations. 1995. Platform for Action. Fourth World Women Conference, Beijing.
- United Nations. 1979. Convention of The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

LAMPIRAN

- A. Table Dummy Pelaku Pembangunan Perhubungan
- B. Table Dummy Pemanfaat Hasil Pembangunan Perhubungan
- C. Table Dummy Pendukung Pembangunan Perhubungan

Tabel Dummy Pelaku Pembangunan

a. Umum per Satuan Kerja Setingkat Eselon

1. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun
2. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Status (struktural/fungsional) dan Jenis Kelamin, Tahun
3. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun
4. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jenis Kelamin, Tahun
5. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun
6. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun
7. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Wilayah Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun
8. Jumlah dan Persentase SDM yang Baru Diterima menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun, dan

b. Khusus

Inspektorat jenderal

1. Jumlah dan Persentase SDM Pengawas menurut Jenis Kelamin, Tahun....

Balitbang

1. Jumlah dan Persentase Peneliti menurut Satuan Kerja Eselon 2, Status Penelitian dan Jenis Kelamin, Tahun
2. Jumlah dan Persentase Peneliti menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Kajian/ Penelitian dan Jenis Kelamin, Tahun
3. Jumlah dan Persentase Peneliti yang Hasil Penelitiannya Dijadikan Sebagai Bahan Masukan dalam Perumusan Kebijakan/Program/Kegiatan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun....
4. Jumlah dan Persentase Peneliti yang Hasil Penelitiannya Dipublikasikan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun....
5. Jumlah dan Persentase Peneliti Peserta dan Penerima Hadiah Lomba Penelitian menurut Satuan Kerja Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun

Badan Pengembangan SDM Perhubungan

1. Jumlah dan Persentase Pengajar/Instruktur Pendidikan dan Latihan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Bidang Ilmu dan Jenis Kelamin, Tahun....
2. Jumlah dan Persentase Tenaga Kependidikan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Bidang Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun....

Ditjen Perhubungan Darat

1. Jumlah dan Persentase SDM dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Perhubungan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin, Tahun....

Ditjen Perkeretaapian

1. Jumlah dan Persentase Pembina/Fasilitator Pelatihan Perkeretaapian menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Pelatihan dan Jenis Kelamin, Tahun....

Ditjen Perhubungan Laut

1. Jumlah dan Persentase Pembina/Fasilitator Pelatihan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Pelatihan dan Jenis Kelamin, Tahun....
2. Jumlah dan Persentase SDM Berkompetensi Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) menurut Jenis Kelamin, Tahun....
3. Jumlah dan Persentase SDM yang Mempunyai Pengetahuan tentang Teknologi Transportasi Laut menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Pengetahuan dan Jenis Kelamin, Tahun....

Ditjen Perhubungan Udara

1. Jumlah dan Persentase Personil yang Mempunyai Lisensi menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Kelamin, Tahun
2. Jumlah dan Persentase Pembina/Fasilitator Pelatihan menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Pelatihan dan Jenis Kelamin, Tahun....

Tabel A.1. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1			(100%)			
2.	Satuan Kerja t 2			(100%)			
3.	Satuan Kerja 3			(100%)			
4.	Satuan Kerja 4			(100%)			
5. Dst.	Satuan Kerja 5			(100%)			
	Irjen/Setjen/Badan/ Ditjen			(100%)	Nilkj (100%)	Npj (100%)	Nilkj+Npj (100%)

Tabel A.2. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Status (struktural/fungsional) dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Status	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Pejabat struktural			(100%)			
	Pejabat fungsional tertentu			(100%)			
	Pejabat fungsional umum			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja t 2						
	Pejabat struktural			(100%)			
	Pejabat fungsional tertentu			(100%)			
	Pejabat fungsional umum			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja t 3						
	Pejabat struktural			(100%)			
	Pejabat fungsional tertentu			(100%)			
	Pejabat fungsional umum			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%

4.	Satuan Kerja 4						
	Pejabat struktural			(100%)			
	Pejabat fungsional tertentu			(100%)			
	Pejabat fungsional umum			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
5. dst..	Satuan Kerja 5						
	Pejabat struktural			(100%)			
	Pejabat fungsional tertentu			(100%)			
	Pejabat fungsional umum			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	Irjen/Setjen/Badan/ Ditjen						
	Pejabat struktural			(100%)			
	Pejabat fungsional			(100%)			
	Pejabat fungsional umum			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel A.3. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Status	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Eselon 1			(100%)			
	Eselon 2			(100%)			
	Eselon 3			(100%)			
	Eselon 4			(100%)			
	Non-eselon			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Eselon 1			(100%)			
	Eselon 2			(100%)			
	Eselon 3			(100%)			
	Eselon 4			(100%)			
	Non-eselon			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Eselon 1			(100%)			
	Eselon 2			(100%)			
	Eselon 3			(100%)			
	Eselon 4			(100%)			
	Non-eselon			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst.....	Satuan Kerja 4						
	Eselon 1			(100%)			
	Eselon 2			(100%)			
	Eselon 3			(100%)			
	Eselon 4			(100%)			
	Non-eselon			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	Irjen/Setjen/Badan/ Ditjen						
	Eselon 1			(100%)			

	Eselon 2			(100%)			
	Eselon 3			(100%)			
	Eselon 4			(100%)			
	Non-eselon			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel A.4. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Jabatan Fungsional (fung)	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Jabatan Fungsional A						100%
	Jabatan Fungsional B						100%
	Jabatan Fungsional C						100%
	Jabatan Fungsional D						100%
	Sub-jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						100%
	Jabatan Fungsional A						
	Jabatan Fungsional B						100%
	Jabatan Fungsional C						100%
	Jabatan Fungsional D						100%
	Sub-jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						100%
	Jabatan Fungsional A						100%
	Jabatan Fungsional B						
	Jabatan Fungsional C						100%
	Jabatan Fungsional D						100%
	Sub-jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						100%
	Jabatan Fungsional A						100%
	Jabatan Fungsional B						100%
	Jabatan Fungsional C						
	Jabatan Fungsional D						100%
	Sub-jumlah						100%
5. dst...	Satuan Kerja 5						100%
	Jabatan Fungsional A						100%
	Jabatan Fungsional B						100%
	Jabatan Fungsional C						100%
	Jabatan Fungsional D						
	Sub-jumlah						100%
	Irjen/Setjen/Badan/ Ditjen						100%
	Jabatan Fungsional A						100%
	Jabatan Fungsional B						100%
	Jabatan Fungsional C						100%
	Jabatan Fungsional D						100%
	Jumlah						100%

Tabel A.5. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2,
Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Golongan	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Golongan IV			(100%)			
	Golongan III			(100%)			
	Golongan II			(100%)			
	Golongan I			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Golongan IV			(100%)			
	Golongan III			(100%)			
	Golongan II			(100%)			
	Golongan I			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Golongan IV			(100%)			
	Golongan III			(100%)			
	Golongan II			(100%)			
	Golongan I			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst....	Satuan Kerja 4						
	Golongan IV			(100%)			
	Golongan III			(100%)			
	Golongan II			(100%)			
	Golongan I			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	Irjen/Setjen/Badan/ Ditjen						
	Golongan IV			(100%)			
	Golongan III			(100%)			
	Golongan II			(100%)			
	Golongan I			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel A.6. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2,
Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Pendidikan	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	S3			(100%)			
	S2			(100%)			
	S1/D4			(100%)			
	Diploma 1, 2, 3			(100%)			
	SMK/SMU dan kurang			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	S3			(100%)			
	S2			(100%)			
	S1			(100%)			
	Diploma			(100%)			
	SMK/SMU dan kurang			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	S3			(100%)			
	S2			(100%)			
	S1			(100%)			
	Diploma			(100%)			
	SMK/SMU dan kurang			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst....	Satuan Kerja 4						
	S3			(100%)			
	S2			(100%)			
	S1			(100%)			
	Diploma			(100%)			
	SMK/SMU dan kurang			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	Irjen/Setjen/Badan/ Ditjen						
	S3			(100%)			
	S2			(100%)			
	S1			(100%)			
	Diploma			(100%)			
	SMK/SMU dan kurang			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel A.7. Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2,
Wilayah Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Wilayah	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Wilayah 1			(100%)			
	Wilayah 2			(100%)			
	Wilayah 3			(100%)			
	Wilayah 4			(100%)			
	Wilayah 5...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Wilayah 1			(100%)			
	Wilayah 2			(100%)			
	Wilayah 3			(100%)			
	Wilayah 4			(100%)			
	Wilayah 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Wilayah 1			(100%)			
	Wilayah 2			(100%)			
	Wilayah 3			(100%)			
	Wilayah 4			(100%)			
	Wilayah 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst.....	Satuan Kerja 4						
	Wilayah 1			(100%)			
	Wilayah 2			(100%)			
	Wilayah 3			(100%)			
	Wilayah 4			(100%)			
	Wilayah 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	Irjen/Setjen/Badan/ Ditjen						
	Wilayah 1			(100%)			
	Wilayah 2			(100%)			
	Wilayah 3			(100%)			
	Wilayah 4			(100%)			
	Wilayah 5 ...dst			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel A.8. Jumlah dan Persentase SDM yang Baru Diterima menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun,, dan

No.	Tahun Perekrutan/ Pendidikan yg Ditamatkan	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Tahun 2010						
	S3						100%
	S2						100%
	D4/S1						100%
	D1-D3						100%
	SLTA atau kurang						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Tahun 2009						
	S3						100%
	S2						100%
	D4/S1						100%
	D1-D3						100%
	SLTA atau kurang						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Tahun 2008						
	S3						100%
	S2						100%
	D4/S1						100%
	D1-D3						100%
	SLTA atau kurang						100%
	Sub Jumlah						100%
dst							
	Jumlah						100%
	Sub-jumlah						100%

Khusus: 1. Sekretariat Jenderal

Khusus: 2. Inspektorat Jenderal

Tabel AK.2.1 Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2,
Jenis Monev dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Jenis Monev	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Kegiatan Monev 1						100%
	Kegiatan Monev 2						100%
	Kegiatan Monev 3						100%
	Kegiatan Monev 4						100%
	Kegiatan Monev 5						100%
	Sub-jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Kegiatan Monev 1						100%
	Kegiatan Monev 2						100%
	Kegiatan Monev 3						100%
	Kegiatan Monev 4						100%
	Kegiatan Monev 5						100%
	Sub-jumlah						100%
3. dst.....	Satuan Kerja 3						
	Kegiatan Monev 1						100%
	Kegiatan Monev 2						100%
	Kegiatan Monev 3						100%
	Kegiatan Monev 4						100%
	Kegiatan Monev 5						100%
	Sub-jumlah						100%
4.	Inpektorat Jenderal						
	Kegiatan Monev 1						100%
	Kegiatan Monev 2						100%
	Kegiatan Monev 3						100%
	Kegiatan Monev 4						100%
	Kegiatan Monev 5						100%
	Sub-jumlah						100%

Tabel Ak.3.1 Jumlah dan Persentase Peneliti menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Status Penelitian dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Status Hasil Penelitian	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Belum selesai penelitian						100%
	Selesai penelitian						100%
	Selesai diterbitkan						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Belum selesai penelitian						100%
	Selesai penelitian						100%
	Selesai diterbitkan						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Belum selesai penelitian						100%
	Selesai penelitian						100%
	Selesai diterbitkan						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						
	Belum selesai penelitian						100%
	Selesai penelitian						100%
	Selesai diterbitkan						100%
	Sub-jumlah						100%
5...dst	Satuan Kerja 5						
	Belum selesai penelitian						100%
	Selesai penelitian						100%
	Selesai diterbitkan						100%
	Sub-jumlah						100%
6.	Balitbang						
	Belum selesai penelitian						100%
	Selesai penelitian						100%
	Selesai diterbitkan						100%
	Jumlah						100%

Tabel AK.3.2 Jumlah dan Persentase Peneliti menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2,
Jenis Kajian/ Penelitian dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Jenis Kajian	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja t 1						
	Kajian 1						100%
	Kajian 2						100%
	Kajian 3						100%
	Kajian 4						100%
	Kajian 5						100%
	Sub-jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Kajian 1						100%
	Kajian 2						100%
	Kajian 3						100%
	Kajian 4						100%
	Kajian 5						100%
	Sub-jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Kajian 1						100%
	Kajian 2						100%
	Kajian 3						100%
	Kajian 4						100%
	Kajian 5						100%
	Sub-jumlah						100%
4. dst.....	Satuan Kerja 4						
	Kajian 1						100%
	Kajian 2						100%
	Kajian 3						100%
	Kajian 4						100%
	Kajian 5						100%
	Sub-jumlah						100%
	Balitbang						
	Kajian 1						100%
	Kajian 2						100%
	Kajian 3						100%
	Kajian 4						100%
	Kajian 5						100%
	Jumlah						100%

Tabel AK.3.3 Jumlah dan Persentase Peneliti yang Hasil Penelitiannya Dijadikan Sebagai Bahan Masukan dalam Perumusan Kebijakan/Program/Kegiatan menurut Satuan kerja Eselon 2, Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja/ Jenis Kajian	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja t 1						
	Kebijakan-Program 1						100%
	Kebijakan-Program 2						100%
	Kebijakan-Program 3						100%
	Kebijakan-Program 4						100%
	Kebijakan-Program 5						100%
	Sub-jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Kebijakan-Program 1						100%
	Kebijakan-Program 2						100%
	Kebijakan-Program 3						100%
	Kebijakan-Program 4						100%
	Kebijakan-Program 5						100%
	Sub-jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Kebijakan-Program 1						100%
	Kebijakan-Program 2						100%
	Kebijakan-Program 3						100%
	Kebijakan-Program 4						100%
	Kebijakan-Program 5						100%
	Sub-jumlah						100%
4. dst.....	Satuan Kerja 4						
	Kebijakan-Program 1						100%
	Kebijakan-Program 2						100%
	Kebijakan-Program 3						100%
	Kebijakan-Program 4						100%
	Kebijakan-Program 5						100%
	Sub-jumlah						100%
	Balitbang						
	Kebijakan-Program 1						100%
	Kebijakan-Program 2						100%
	Kebijakan-Program 3						100%
	Kebijakan-Program 4						100%
	Kebijakan-Program 5						100%
	Jumlah						100%

Tabel AK.3.4 Jumlah dan Persentase Peneliti yang Hasil Penelitiannya Dipublikasikan menurut Satuan Kerja Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Publikasi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja t 1						
	Internal Kementerian						100%
	Eksternal Kementerian						100%
	Sub-jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Internal Kementerian						100%
	Eksternal Kementerian						100%
	Sub-jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Internal Kementerian						100%
	Eksternal Kementerian						100%
	Sub-jumlah						100%
4. dst....	Satuan Kerja 4						
	Internal Kementerian						100%
	Eksternal Kementerian						100%
	Internal Kementerian						100%
	Balitbang						
	Internal Kementerian						100%
	Eksternal Kementerian						100%
	Jumlah						100%

Tabel Ak.3.5 Jumlah dan Persentase Peneliti Peserta dan Penerima Hadiah Lomba Penelitian menurut Satuan kerja Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Status dalam Lomba	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Peserta lomba						100%
	Pemenang lomba						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						100%
	Peserta lomba						
	Pemenang lomba						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						100%
	Peserta lomba						100%
	Pemenang lomba						
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						100%
	Peserta lomba						100%
	Pemenang lomba						100%
	Sub-jumlah						
5...dst	Satuan Kerja 5						100%
	Peserta lomba						100%
	Pemenang lomba						100%
	Sub-jumlah						100%

6.	Balitbang						
	Peserta lomba						100%
	Pemenang lomba						100%
	Jumlah						100%

Khusus: 4. Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Tabel AK.4.1 Jumlah dan Persentase Pengajar/Instruktur Pendidikan dan Latihan menurut Satuan kerja Eselon 2, Bidang Ilmu dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja/ Bidang Ilmu	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Bidang Ilmu 1			(100%)			
	Bidang Ilmu 2			(100%)			
	Bidang Ilmu 3			(100%)			
	Bidang Ilmu 4			(100%)			
	Bidang Ilmu 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Bidang Ilmu 1			(100%)			
	Bidang Ilmu 2			(100%)			
	Bidang Ilmu 3			(100%)			
	Bidang Ilmu 4			(100%)			
	Bidang Ilmu 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Bidang Ilmu 1			(100%)			
	Bidang Ilmu 2			(100%)			
	Bidang Ilmu 3			(100%)			
	Bidang Ilmu 4			(100%)			
	Bidang Ilmu 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst....	Satuan Kerja 4						
	Bidang Ilmu 1			(100%)			
	Bidang Ilmu 2			(100%)			
	Bidang Ilmu 3			(100%)			
	Bidang Ilmu 4			(100%)			
	Bidang Ilmu 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	BPSDMP						
	Bidang Ilmu 1			(100%)			
	Bidang Ilmu 2			(100%)			
	Bidang Ilmu 3			(100%)			
	Bidang Ilmu 4			(100%)			
	Bidang Ilmu 5 ...dst			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel AK.4.2 Jumlah dan Persentase Tenaga Kependidikan menurut Satuan kerja Eselon 2 Bidang Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Bidang Kerja	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Bidang Kerja 1			(100%)			
	Bidang Kerja 2			(100%)			
	Bidang Kerja 3			(100%)			
	Bidang Kerja 4			(100%)			
	Bidang Kerja 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Bidang Kerja 1			(100%)			
	Bidang Kerja 2			(100%)			
	Bidang Kerja 3			(100%)			
	Bidang Kerja 4			(100%)			
	Bidang Kerja 2			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Bidang Kerja1			(100%)			
	Bidang Kerja 2			(100%)			
	Bidang Kerja 3			(100%)			
	Bidang Kerja 4			(100%)			
	Bidang Kerja 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst.....	Satuan Kerja 4						
	Bidang Kerja 1			(100%)			
	Bidang Kerja 2			(100%)			
	Bidang Kerja 3			(100%)			
	Bidang Kerja 4			(100%)			
	Bidang Kerja 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	BPSDMP						
	Bidang Kerja 2			(100%)			
	Bidang Kerja 3			(100%)			
	Bidang Kerja 4			(100%)			
	Bidang Kerja 5 ...dst			(100%)			
	Bidang Kerja 2			(100%)			
Jumlah			(100%)	100%	100%	100%	

Khusus: 5. Perhubungan Darat

Tabel AK.5.1 Jumlah dan Persentase SDM dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Perhubungan menurut Jenis Materi dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Jenis Sosialisasi	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Jenis Sosialisasi 1			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 2			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 3			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 4			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Jenis Sosialisasi 1			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 2			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 3			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 4			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Jenis Sosialisasi 1			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 2			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 3			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 4			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst....	Satuan Kerja 4						
	Jenis Sosialisasi 1			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 2			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 3			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 4			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
Ditjen Perhubungan Darat							
	Jenis Sosialisasi 1			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 2			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 3			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 4			(100%)			
	Jenis Sosialisasi 5 ...dst			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel AK.6.1 Jumlah dan Persentase Pembina/Fasilitator Pelatihan Perkeretaapian menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Pelatihan dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Jenis Pelatihan	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst....	Satuan Kerja 4						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	Ditjen Perkeretaapian						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel AK.7.1 Jumlah dan Persentase Pembina/Fasilitator Pelatihan menurut Jenis Pelatihan dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja/Jenis Pelatihan	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst.....	Satuan Kerja 4						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	Ditjen Perhubungan laut						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel AK.7.2 Jumlah dan Persentase SDM Berkompetensi Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) menurut Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja/Kualifikasi	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Kualifikasi 1			(100%)			
	Kualifikasi 2			(100%)			
	Kualifikasi 3			(100%)			
	Kualifikasi 4			(100%)			
	Kualifikas 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Kualifikasi 1			(100%)			
	Kualifikasi 2			(100%)			
	Kualifikasi 3			(100%)			
	Kualifikasi 4			(100%)			
	Kualifikas 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Kualifikasi 1			(100%)			
	Kualifikasi 2			(100%)			
	Kualifikasi 3			(100%)			
	Kualifikasi 4			(100%)			
	Kualifikas 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst.....	Satuan Kerja 4						
	Kualifikasi 1			(100%)			
	Kualifikasi 2			(100%)			
	Kualifikasi 3			(100%)			
	Kualifikasi 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	Ditjen Perhubungan Laut						
	Kualifikasi 1			(100%)			
	Kualifikasi 2			(100%)			
Kualifikasi 3			(100%)				
Kualifikasi 4			(100%)				
Kualifikas 5 ...dst			(100%)				
Jumlah			(100%)	100%	100%	100%	

Tabel AK.7.3 Jumlah dan Persentase SDM yang Memiliki Pengetahuan tentang Teknologi Transportasi Laut (TTL) menurut Jenis dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja/Kualifikasi TTL	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Kualifikasi 1			(100%)			
	Kualifikasi 2			(100%)			
	Kualifikasi 3			(100%)			
	Kualifikasi 4			(100%)			
	Kualifikasi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Kualifikasi 1			(100%)			
	Kualifikasi 2			(100%)			
	Kualifikasi 3			(100%)			
	Kualifikasi 4			(100%)			
	Kualifikasi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Kualifikasi 1			(100%)			
	Kualifikasi 2			(100%)			
	Kualifikasi 3			(100%)			
	Kualifikasi 4			(100%)			
	Kualifikasi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst....	Satuan Kerja 4						
	Kualifikasi 1			(100%)			
	Kualifikasi 2			(100%)			
	Kualifikasi 3			(100%)			
	Kualifikasi 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
Ditjen Perhubungan Laut							
	Kualifikasi 1			(100%)			
	Kualifikasi 2			(100%)			
	Kualifikasi 3			(100%)			
	Kualifikasi 4			(100%)			
	Kualifikasi 5 ...dst			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel AK.7.4 Jumlah dan Persentase Pembina/Fasilitator Pelatihan menurut Jenis Pelatihan dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja/Jenis Pelatihan	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst.....	Satuan Kerja 4						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
Ditjen Perhubungan Laut	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel AK.8.1 Jumlah dan Persentase SDM yang Mempunyai Lisensi menurut Jenis Lisensi dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/Jenis Lisensi	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Jenis Lisensi 1			(100%)			
	Jenis Lisensi 2			(100%)			
	Jenis Lisensi 3			(100%)			
	Jenis Lisensi 4			(100%)			
	Jenis Lisensi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Jenis Lisensi 1			(100%)			
	Jenis Lisensi 2			(100%)			
	Jenis Lisensi 3			(100%)			
	Jenis Lisensi 4			(100%)			
	Jenis Lisensi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Jenis Lisensi 1			(100%)			
	Jenis Lisensi 2			(100%)			
	Jenis Lisensi 3			(100%)			
	Jenis Lisensi 4			(100%)			
	Jenis Lisensi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst....	Satuan Kerja 4						
	Jenis Lisensi 1			(100%)			
	Jenis Lisensi 2			(100%)			
	Jenis Lisensi 3			(100%)			
	Jenis Lisensi 4			(100%)			
	Jenis Lisensi 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
	Ditjen Perhubungan Udara						
	Jenis Lisensi 1			(100%)			
	Jenis Lisensi 2			(100%)			
	Jenis Lisensi 3			(100%)			
	Jenis Lisensi 4			(100%)			
	Jenis Lisensi 5 ...dst			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel AK.8.2 Jumlah dan Persentase Pembina/Fasilitator Pelatihan menurut Jenis Pelatihan dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja/Jenis Pelatihan	Komposisi			Angka Partisipasi		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
4. dst....	Satuan Kerja 4						
	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Sub-jumlah			(100%)	100%	100%	100%
Ditjen Perhubungan Udara	Jenis Pelatihan 1			(100%)			
	Jenis Pelatihan 2			(100%)			
	Jenis Pelatihan 3			(100%)			
	Jenis Pelatihan 4			(100%)			
	Jenis Pelatihan 5 ...dst			(100%)			
	Jumlah			(100%)	100%	100%	100%

Tabel Dummy Pemanfaat Hasil Pembangunan

a. Pembangunan SDM: Peningkatan Kualitas SDM/Karyawan

1. Jumlah dan Persentase SDM menurut Status Tugas Belajar S1/S2/S3 Di Dalam Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun....
2. Jumlah dan Persentase SDM menurut Keikutsertaan dalam Tugas Belajar S1/S2/S3 Di Luar Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun....
3. Jumlah dan Persentase SDM menurut Keikutsertaan dalam Berbagai Jenis Diklat Teknis menurut Jenis Kelamin, Tahun....
4. Jumlah dan Persentase SDM menurut Keikutsertaan dalam Berbagai Jenis Diklat Administrasi menurut Jenis Kelamin, Tahun
5. Jumlah dan Persentase SDM menurut Keikutsertaan dalam Berbagai Jenis Diklat Penjenjangan Tk 1/2/3 menurut Jenis Kelamin, Tahun....
6. Jumlah dan Persentase SDM Peserta Rapat Koordinasi menurut Jenis Kelamin, Tahun
7. Jumlah dan Persentase SDM Peserta Sosialisasi menurut Jenis Kelamin, Tahun....
8. Jumlah dan Persentase SDM Peserta Diskusi/Workshop menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Diskusi/Workshop dan Jenis Kelamin, Tahun

b. Pembangunan SDM: Pemberdayaan masyarakat

1. Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Sosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi menurut Jenis Kelamin, Tahun.....
2. Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Penyuluhan Lainnya menurut Jenis Kelamin, Tahun.....
3. Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Pendidikan Bidang Transportasi menurut Jenis Kelamin, Tahun
4. Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Pendidikan Kedinasan Bidang Transportasi menurut dan Jenis Kelamin, Tahun
5. Jumlah dan Persentase Pelamar Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Bidang Transportasi menurut Provinsi Asal dan Jenis Kelamin, Tahun
6. Jumlah dan Persentase Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Bidang Transportasi menurut Provinsi Asal dan Jenis Kelamin, Tahun
7. Jumlah dan Persentase Seluruh Mahasiswa Sekolah Tinggi Bidang Transportasi menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun
8. Jumlah dan Persentase Mahasiswa Sekolah Tinggi Bidang Transportasi yang Lulus menurut Provinsi Penempatan dan Jenis Kelamin, Tahun

c. Pembangunan Fisik

1. Jumlah dan Persentase Pelabuhan/Terminal/Stasiun Utama di Ibukota Provinsi menurut Ada/Tidaknya Nursery Room, Tahun

d. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perhubungan

Angkutan Darat

1. Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Darat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

2. Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Angkutan Darat menurut Provinsi Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
3. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan Darat di Terminal Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
4. Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Darat dan Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Terminal Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

Angkutan Kereta Api

5. Jumlah dan Persentase Penumpang Kereta Api menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
6. Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Kereta Api menurut Provinsi Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
7. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan Kereta Api di Stasiun Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
8. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Stasiun Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

Angkutan Laut

9. Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Laut menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
10. Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Angkutan Laut menurut Provinsi Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
11. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan Laut di Pelabuhan Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
12. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Pelabuhan Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

Angkutan Udara

13. Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Udara menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
14. Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Angkutan Udara menurut Provinsi Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
15. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan Udara di Bandara Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
16. Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Bandara Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....
17. Jumlah dan Persentase Penduduk Pemegang dan Pemohon Lisensi Usaha Bidang Transportasi Udara menurut Jenis Kelamin, Tahun

e. Hasil Analisis Kualitatif

1. Jumlah dan Persentase Dokumen/Peraturan yang Dianalisis menurut Responsif / Tidaknya terhadap Gender, Tahun....

a. Pembangunan SDM: Peningkatan Kualitas SDM/Karyawan

Tabel B.1.1 Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Status Tugas Belajar S1/S2/S3 di Dalam Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2 / Jenis Tugas Belajar	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Pendidikan S1						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S3						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Pendidikan S1						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S3						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						
	Pendidikan S1						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S3						100%
	Sub-jumlah						100%
5. dst	Satuan Kerja 5						
	Pendidikan S1						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S3						100%
	Sub-jumlah						100%
6.	Irjen/Setjen/Badan/Ditjen						
	Pendidikan S1						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S3						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.1.2 Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Keikutsertaan dalam Tugas Belajar S1/S2/S3 di Luar Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Stingkat Eselon 2/ Jenis Tugas Belajar	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Pendidikan S3						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S1						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Pendidikan S1						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S3						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Pendidikan S1						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S3						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						
	Pendidikan S1						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S3						100%
	Sub-jumlah						100%
5. dst	Satuan Kerja 5						
	Pendidikan S1						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S3						100%
	Sub-jumlah						100%
6.	Irjen/Setjen/Badan/Ditjen						
	Pendidikan S1						100%
	Pendidikan S 2						100%
	Pendidikan S3						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.1.3 Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Keikutsertaan dalam Berbagai Jenis Diklat Teknis menurut Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Jenis Diklat	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Sub-jumlah						100%
5.dst	Satuan Kerja 5						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Sub-jumlah						100%
6.	Irjen/Setjen/Badan/Ditjen						
	Diklat Teknis 1						100%
	Diklat Teknis 2						100%
	Diklat Teknis 3						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.1.4 Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2,
Keikutsertaan dalam Berbagai Jenis Diklat Administrasi menurut Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Jenis Diklat	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Sub-Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Sub-Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Sub-jumlah						100%
5. ...dst	Satuan Kerja 5						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Sub-jumlah						100%
6	Irjen/Setjen/Badan/Ditjen						
	Diklat Administrasi 1						100%
	Diklat Administrasi 2						100%
	Diklat Administrasi 3						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.1.5 Jumlah dan Persentase SDM menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Keikutsertaan dalam Berbagai Jenis Diklat Penjenjangan Tk 1/2/3/4 menurut Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2 /Jenis Diklat	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Diklat Penjenjangan Tk 4						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 3						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 2						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 1						100%
	Sub-Jumlah						
2.	Satuan Kerja 2						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 4						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 3						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 2						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 1						
	Sub-Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 4						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 3						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 2						
	Diklat Penjenjangan Tk 1						100%
	Sub-Jumlah						100%
4.dst	Satuan Kerja 4						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 4						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 3						
	Diklat Penjenjangan Tk 2						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 1						100%
	Sub-Jumlah						100%
5	Irjen/Setjen/Badan/Ditjen						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 4						
	Diklat Penjenjangan Tk 3						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 2						100%
	Diklat Penjenjangan Tk 1						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.1.6 Jumlah dan Persentase SDM Peserta Rapat Koordinasi menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Rapat dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Jenis Koordinasi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub-jumlah						100%
5...dst	Satuan Kerja 5						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub-jumlah						100%
6.	Irjen/Setjen/Badan/Ditjen						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Jumlah						100%

Keterangan: Internal kementerian adalah satker di luar satker setingkat eselon 1 yang bersangkutan

Tabel B.1.7 Jumlah dan Persentase SDM Peserta Sosialisasi menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Sosialisasi dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Jenis Sosialisasi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Sub-jumlah						100%
5...dst	Satuan Kerja 5						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Sub-jumlah						100%
6.	Irjen/Setjen/Badan/Ditjen						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.1.8 Jumlah dan Persentase SDM Peserta Diskusi/Workshop menurut Satuan Kerja Setingkat Eselon 2, Jenis Diskusi/Workshop dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja Setingkat Eselon 2/ Jenis Hasil Penelitian	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub-jumlah						100%
5...dst	Satuan Kerja 5						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub-jumlah						100%
6.	Irjen/Setjen/Badan/Ditjen						
	Internal satker eselon 1						100%
	Internal kementerian						100%
	Eksternal kementerian						100%
	Sub-jumlah						100%

Keterangan: Internal kementerian adalah satker di luar satker setingkat eselon 1 yang bersangkutan

b. Pembangunan SDM: Pemberdayaan masyarakat

Tabel B.2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Sosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi menurut Satuan Kerja Penyelenggara Setingkat Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun....

No.	Satuan Kerja/ Jenis Sosialisasi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
5.....dst	Satuan Kerja 5						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Sub Jumlah						100%
6.	Irjen/Setjen/Ditjen/Badan						
	Sosialisasi jenis 1						100%
	Sosialisasi jenis 2						100%
	Sosialisasi jenis 3						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.2.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Penyuluhan Lainnya
menurut Satuan Kerja Penyelenggara Setingkat Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Satuan Kerja/ Jenis Penyuluhan	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Jenis penyuluhan 1						100%
	Jenis penyuluhan 2						100%
	Jenis penyuluhan 3						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 2						
	Jenis penyuluhan 1						100%
	Jenis penyuluhan 2						100%
	Jenis penyuluhan 3						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 3						
	Jenis penyuluhan 1						100%
	Jenis penyuluhan 2						100%
	Jenis penyuluhan 3						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 4						
	Jenis penyuluhan 1						100%
	Jenis penyuluhan 2						100%
	Jenis penyuluhan 3						100%
	Sub Jumlah						100%
5.....dst	Satuan Kerja 5						
	Jenis penyuluhan 1						100%
	Jenis penyuluhan 2						100%
	Jenis penyuluhan 3						100%
	Sub Jumlah						100%
6.	Irjen/Setjen/Badan/Ditjen						
	Jenis penyuluhan 1						100%
	Jenis penyuluhan 2						100%
	Jenis penyuluhan 3						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.2.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Pelatihan Transportasi
menurut Satuan Kerja Penyelenggara Setingkat Eselon 2 dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Sekolah Tinggi/ Jenis Pelatihan	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Satuan Kerja 1						
	Jenis Pelatihan 1						100%
	Jenis Pelatihan 2						100%
	Jenis Pelatihan 3						100%
	Sub Jumlah						100%
2.	Satuan Kerja 1						
	Jenis Pelatihan 1						100%
	Jenis Pelatihan 2						100%
	Jenis Pelatihan 3						100%
	Sub Jumlah						100%
3.	Satuan Kerja 1						
	Jenis Pelatihan 1						100%
	Jenis Pelatihan 2						100%
	Jenis Pelatihan 3						100%
	Sub Jumlah						100%
4.	Satuan Kerja 1						
	Jenis Pelatihan 1						100%
	Jenis Pelatihan 2						100%
	Jenis Pelatihan 3						100%
	Sub Jumlah						100%
	Setjen/Itjen/Badan/Ditjen						
	Jenis Pelatihan 1						100%
	Jenis Pelatihan 2						100%
	Jenis Pelatihan 3						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Peserta Pendidikan Kedinasan Bidang Transportasi
menurut dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Satuan Kerja/Jenis Pendidikan	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Sekolah Tinggi						100%
2.	Program Diploma						100%
3.	Program Non-gelar						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.2.5 Jumlah dan Persentase Pelamar Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Bidang Transportasi menurut Provinsidan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.2.6 Jumlah dan Persentase Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Bidang Transportasi menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.2.7 Jumlah dan Persentase Seluruh Mahasiswa Sekolah Tinggi Bidang Transportasi menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.2.8 Jumlah dan Persentase Mahasiswa Sekolah Tinggi Bidang Transportasi yang Lulus menurut Wilayah Penempatan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

c. Pembangunan Fisik

Tabel B.3.1. Jumlah dan Persentase Pelabuhan/ Stasiun Utama di Ibukota Provinsi menurut Ada/Tidaknya Nursery Room, Tahun

N0.	Jenis	Ada	Tidak	Jumlah
1	Terminal bus			
2	Pelabuhan laut			
3	Pelabuhan udara			
4	Stasiun Kereta api			

d. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perhubungan

i. Angkutan Darat

Tabel B.4.1. Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Darat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	DI Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.2 Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Angkutan Darat menurut Provinsi Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.3 Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Darat yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan di Terminal Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.4 Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Darat yang Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Terminal Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	DI Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

ii. Angkutan Kereta Api

Tabel B.4.5 Jumlah dan Persentase Penumpang Kereta Api menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	DI Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.6 Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Angkutan Kereta Api menurut Provinsi Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.7

Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan Kereta Api di Stasiun Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.8

Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Kereta Api yang Menjadi Korban Gangguan Keamana di Stasiun Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	DI Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

iii. Angkutan Laut

Tabel B.4.9 Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Laut menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	DI Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.10

Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Angkutan Laut menurut Provinsi
Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.11

Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan
Laut di Pelabuhan Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.12

Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Laut yang Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Pelabuhan Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	DI Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

iv. Angkutan Udara

Tabel B.4.13 Jumlah dan Persentase Penumpang Angkutan Udara menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	DI Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.14

Jumlah dan Persentase Penumpang Korban Kecelakaan Angkutan Udara menurut Provinsi
Tempat Kecelakaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.15

Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menyatakan Keluhan terhadap Pelayanan Angkutan
Udara di Bandara Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin dan Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	D I Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.16

Jumlah dan Persentase Penumpang yang Menjadi Korban Gangguan Keamanan di Bandara Utama menurut Provinsi dan Jenis Kelamin dan Tahun.....

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	DI Aceh						
2.	Sumatera Utara						100%
dst							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
							100%
	Papua Barat						100%
	Papua						100%
	Jumlah						100%

Tabel B.4.17

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Pemegang dan Pemohon Lisensi Usaha Bidang Transportasi Udara menurut Jenis Kelamin, Tahun

No.	Provinsi	Lk	Pr	Lk+Pr	Komposisi		
					Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Pemohon Lisensi						
	a. Sudah diproses						100%
	b. Belum diproses						100%
2.	Pemegang Lisensi						
	a. Agen Perjalanan						100%
	b. lainnya						100%

e. Hasil Analisis Kualitatif

Tabel B15. Jumlah dan Persentase Dokumen/Peraturan yang Dianalisis menurut Responsif/Tidaknya terhadap Gender, Tahun

No.	Jenis Dokumen yang Dianalisis	Jenis Pernyataan				Jumlah
		Netral	Bias laki-laki	Bias perempuan	Responsif gender	
1	Dokumen A					100%
						100%
						100%
						100%
2	Dokumen B					100%
						100%
						100%
						100%
3	Dokumen C					100%
						100%
						100%
	Jumlah Dokumen =					

Tabel Dummy Pendukung Pembangunan Perhubungan

1. Jumlah dan Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun.....
2. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Umur dan Jenis Kelamin, Tahun.....
3. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
4. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
5. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
6. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Rata-rata Jam Kerja per Minggu dan Jenis Kelamin, Tahun.....
7. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Skala Perusahaan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
8. Jumlah dan Persentase Pekerja Perusahaan Angkutan menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun.....
9. Jumlah dan Persentase Pekerja Usaha Angkutan Rumah Tangga, dan Jenis Kelamin, Tahun.....
10. Jumlah dan Persentase Penumpang Kereta Api menurut Jenis Angkutan dan Jenis Kelamin, Tahun.....

Tabel C.1
Jumlah dan Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun

Lapangan Pekerjaan	Lk	Pr	Lk+Pr	% thd Lk	% thd Pr	% thd Lk+Pr
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel C.2

Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan menurut Umur dan Jenis Kelamin, Tahun ...

Umur	Lk	Pr	Lk+Pr	% thd Lk	% thd Pr	% thd Lk+Pr
15-19						
20-24						
25-29						
30-34						
35-39						
40-44						
45-49						
50-54						
55-59						
60+						
Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel C.3

Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan
menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun

Status Pekerjaan	Lk	Pr	Lk+Pr	% thd Lk	% thd Pr	% thd Lk+Pr
Berusaha sendiri						
Berusaha dg brh td ttap						
Berusaha dg br ttap						
Buruh/karyawan						
Pekerja bebas						
Pekerja Keluarga						
Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel C.4

Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan
menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun ...

Jenis Pekerjaan	Lk	Pr	Lk+Pr	% thd Lk	% thd Pr	% thd Lk+Pr
Tenaga Prof, tehnisi						
Tenaga kepem/ menejer/ pelaksana						
Tata Usaha						
Tenaga penjualan						
Tenaga jasa						
Tenaga produksi						
Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel C.5
Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan
menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun

Pendidikan	Lk	Pr	Lk+Pr	% thd Lk	% thd Pr	% thd Lk+Pr
Tidak sekolah						
Tidak Tamat SD						
SD						
SMP						
SMA						
SMK						
D I, II, III						
PT						
Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel C.6
Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Angkutan
menurut Rata-rata Jam Kerja per Minggu dan Jenis Kelamin, Tahun

Pendidikan	Lk	Pr	Lk+Pr	% thd Lk	% thd Pr	% thd Lk+Pr
Jam kerja						
0 jam						
1-4 jam						
5-9 jam						
10-14 jam						
15-19 jam						
20-24 jam						
25-34 jam						
36-44 jam						
45-54 jam						
55-59 jam						
60-74 jam						
75 jam +						
Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel C.10
Jumlah dan Persentase Penumpang menurut jenis Angkutan dan Jenis Kelamin, Tahun....

Jenis Angkutan	Lk	Pr	Lk+Pr	% thd Lk	% thd Pr	% thd Lk+Pr
Darat						
Kereta api						
Laut						
Udara						
Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Merdeka Barat No.15, Jakarta 10110

Telepon : (021) 3842638, 3805563 Faksimile : (021) 3805562, 3805559

Website : www.menegpp.go.id